

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI**

**OPOSISI KOMENTAR UNGGAHAN INSTAGRAM
@KUMPARANCOM**

**(Studi pada Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Batas
Usia Capres-Cawapres)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)
Pada Fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Riau



CAHYONO PUTRA

NPM : 199110184
PROGRAM STUDI : ILMU KOMUNIKASI

**FAKULTAS ILMU KOMUNIASKI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2026**

Lembar Persetujuan Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Cahyono Putra
NPM : 199110184
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Penelitian : Oposisi Komentar Unggahan Instagram
@kumparancom (tudi pada Putusan Mahkamah
Konstitusi tentang Batas Usia Capres-
Cawapres)

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk disidangkan dalam ujian skripsi.

Pekanbaru, 26 Januari 2026

Menyetujui,
Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi



Benni Handayani, M.I.Kom.

Pembimbing



Assoc. Prof. Dr. Yudi Daherman, M.I.Kom

Lembar Persetujuan Tim Penguji

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Nama : Cahyono Putra
NPM : 199110184
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Hari/ Tanggal Ujian Skripsi : Rabu, 1 April 2026
Judul Penelitian : Oposisi Komentar Unggahan Instagram
@Kumparancom (Studi Pada Putusan
Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia
Capres-Cawapres)

Naskah ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu tim penguji Skripsi Fakultas Ilmu Komunikasi dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 09 April 2026

Tim Penguji Skripsi
Ketua Penguji

Assoc. Prof. Dr. Yudi Daherman, S.Sos., M.I.Kom

Penguji

Assoc. Prof. Dr. Fatmawati, S.IP., MM

Penguji

Happy Wulandari, S.I.Kom., M.Sc

Mengetahui
Wakil Dekan/I Bidang Akademik

Dr. Al Sukri, S.Sos., M.I.Kom

Berita Acara Ujian Komprehensif

UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau, Nomor : 040/FIKOM/KPTS/2026. Tanggal **1 April 2026** maka dihadapan Tim penguji pada hari ini **Rabu tanggal 1 April 2026, Jam : 10.00 – 11.00 WIB**, bertempat di **Konferensi Pers** Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian skripsi mahasiswa atas:

Nama : Cahyono Putra
NPM : 199110184
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Penelitian : Oposisi Komentar Unggahan Instagram
@Kumparancom (Studi Pada Putusan Mahkamah
Konstitusi Tentang Batas Usia Capres-Cawapres)
Nilai Ujian : Angka "82,1" ; Huruf "A-"
Keputusan Hasil Ujian : Lulus
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Assoc. Prof. Dr. Yudi Daherman, S.Sos, M.I.Kom	Ketua	1. 
2.	Assoc. Prof. Dr. Fatmawati, S.IP., MM	Anggota	2. 
3.	Happy Wulandari, M.Sc	Anggota	3. 

Pekanbaru, 01 April 2026
Dekan Fikom UIR.


Dr. Eko Heru, M.Soc., Sc
NPK : 150802526

Lembar Pengesahan

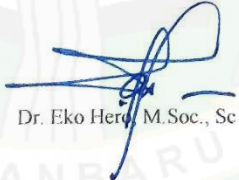
LEMBAR PENGESAHAN

**OPOSISI KOMENTAR UNGGAHAN INSTAGRAM @KUMPARANCOM
(STUDI PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG
BATAS USIA CAPRES-CAWAPRES)**

Yang Diajukan Oleh:
Cahyono Putra
NPM : 199110184

Pada Tanggal :
09 April 2026

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi


Dr. Eko Heru, M.Soc., Sc

Tim Penguji Skripsi :

Ketua	Assoc. Prof. Dr. Yudi Daherman, S.Sos. M.I.Kom	
Anggota	Assoc. Prof. Dr. Fatmawati, S.IP., MM	
Anggota	Happy Wulandari, M.Sc	

V

Lembar Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Cahyono Putra
Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalan Nyirih/ 17 Juli 2000
NPM : 199110184
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Fakultas : Ilmu Komunikasi
Alamat/NO. Tlp : Jl. Karya 1 Gg. Pusri/ 082286075054
Judul Skripsi : Oposisi Komentar Unggahan Instagram
@kumparancom (Studi pada Putusan MAhkamah
Konstitusi tentang Batas Usia Capres-Cawapres)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya (skripsi) Adalah aslidan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Riau maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan orang lain, kecuali pengarahan Tim Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam daftar Pustaka.
4. Bersedia untuk mempublikasikan karya tulis saya (skripsi) di jurnal Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau.
5. Pernyataan ini sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dari apa yang saya nyatakan di atas (point 1-4) maka saya bersedia menerima sanksi pembatalan nilai Ujian Komprehensif dan atau pencabutan gelar akademik kesarjanaan saya dan sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Islam Riau.

Pekanbaru, 26 Januari 2026

Yang menyatakan



Cahyono Putra

PERSEMBAHAN

الرحيم الرحمن الله بسم

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, karya ilmiah ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta, Ibu Sri Wahyuni dan Ayah Amat Syaiful, yang tidak pernah berhenti memberikan doa, dukungan, serta kasih sayang. Segala pengorbanan yang diberikan menjadi sumber motivasi terbesar dalam setiap langkah perjalanan pendidikan saya.

Keluarga besar yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan moral sehingga saya mampu menyelesaikan studi ini dengan baik.

Bapak Assoc. Prof. Dr. Yudi Daherman, M.I.Kom selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dengan penuh kesabaran serta memberikan arahan yang sangat berharga.

Almamater Universitas Islam Riau, khususnya Fakultas Ilmu Komunikasi, sebagai tempat saya menimba ilmu dan memperluas wawasan di bidang komunikasi.

Sahabat dan rekan seperjuangan yang selalu hadir dalam suka maupun duka, memberikan motivasi, serta berbagi pengalaman selama masa perkuliahan.

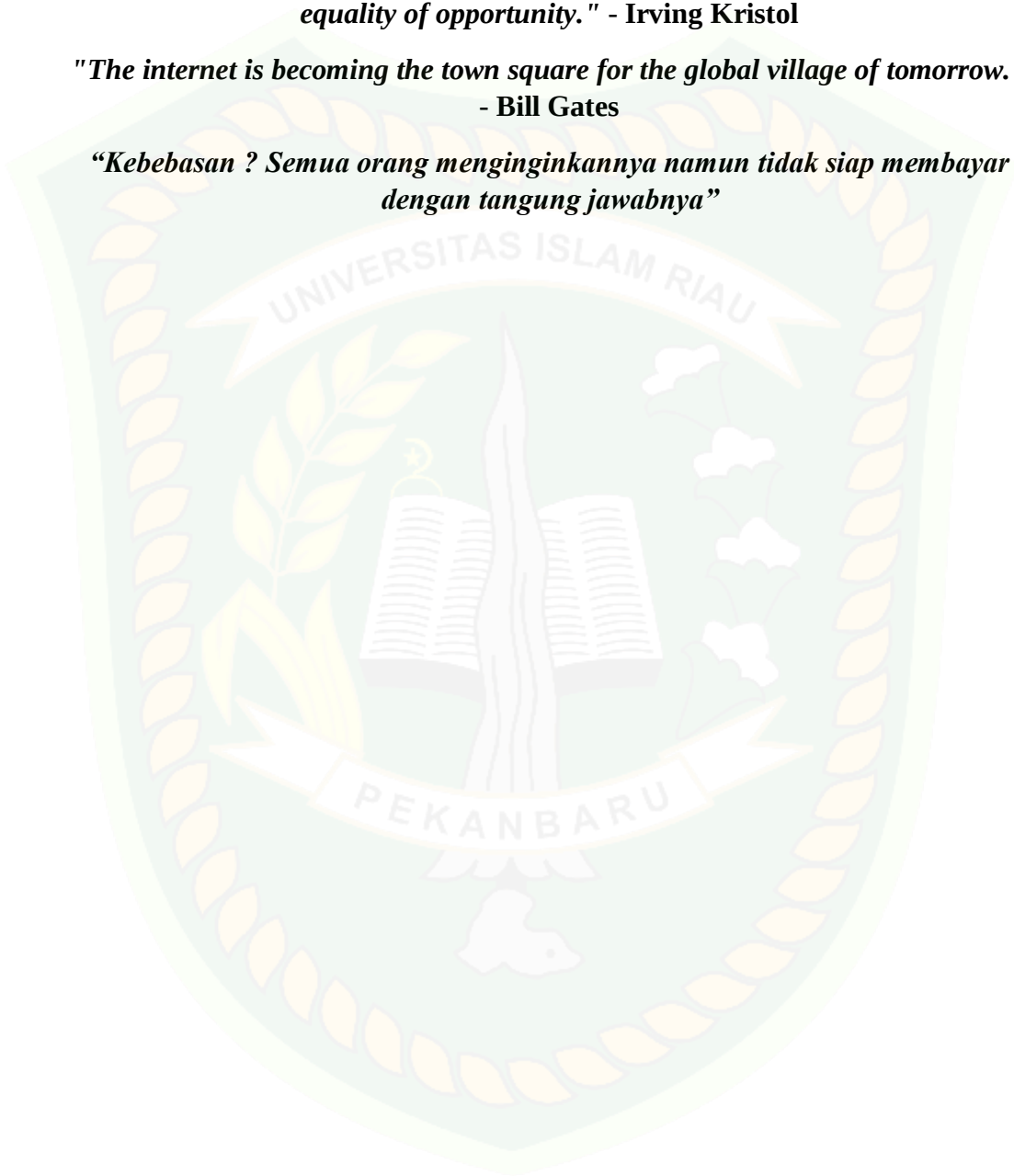
Generasi muda Indonesia, semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi, meskipun kecil, bagi pemahaman tentang partisipasi politik digital serta pentingnya literasi media di era demokrasi digital.

MOTTO

"Democracy does not guarantee equality of conditions - it only guarantees equality of opportunity." - Irving Kristol

***"The internet is becoming the town square for the global village of tomorrow."
- Bill Gates***

"Kebebasan ? Semua orang menginginkannya namun tidak siap membayar dengan tanggung jawabnya"



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Oposisi Komentar Unggahan Instagram @kumparancom (Studi pada Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Batas Usia Capres-Cawapres)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Riau.

Pada penulisan skripsi ini peneliti banyak sekali mendapatkan dukungan serta bantuan dari banyak pihak. Untuk itu peneliti ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya, khususnya kepada :

1. Dr. Eko Hero, M.Soc., Sc selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau.
2. Benni Handayani, S.I.Kom., M.I.Kom selaku Ketua Program studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau.
3. Dr. Yudi Daherman, M.I.Kom selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan motivasi, pendapat dan masukan yang sangat berarti hingga penulis sampai di saat sekarang ini.
4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau yang selama ini telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat serta membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
5. Ibu kepala Tata Usaha beserta seluruh Staf pada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau yang senantiasa memberikan bantuan administrasi kepada penulis sehingga penulis dapat melaksanakan perkuliahan dengan sebagaimana mestinya.
6. Orang Tua Tercinta Ibu Sri Wahyuni ayah Amat Syaiful dan juga keluarga yang turut memberikan dukungan serta doanya.
7. Rekan-rekan seperjuangan dan teman-teman seperjuangan saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan masukan, semangat dan motivasi.

8. Dan kepada seluruh yang terlibat baik dalam mendukung maupun memberi sarananya kepada penulis yang tidak dapat penulis cantumkan satu persatu.

Namun penulis menyadari bahwa penulisan usulan penelitian ini masih perlu mendapatkan perhatian dari berbagai sisi. Oleh karena itu, peneliti dengan lapang dada menerima segala bentuk kritik dan saran yang membangun sehingga peneliti dapat memaksimalkan penulisan skripsi ini. Agar dapat menjadi sebuah karya ilmiah yang baik nantinya. Akhir kata semoga penelitian ini mampu memberikan manfaat untuk peneliti sendiri dan bagi para pembaca, Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 26 Mei 2025
Penulis,

Cahyono Putra
NPM. 199110184

DAFTAR ISI

Judul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Persetujuan Tim Penguji	iii
Berita Acara Ujian Komprehensif	iv
Lembar Pengesahan	v
Lembar Pernyataan	vi
Persembahan	vii
Motto	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xi
Daftar Table	xiv
Daftar Gambar	xv
Abstrak	xvi
<i>Abstract</i>	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah Penelitian.....	1
B. Identifikasi Masalah Penelitian	9
C. Pembahasan Masalah Penelitian	11
D. Rumusan Masalah Penelitian	13
E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	13
1. Tujuan Penelitian.....	13
2. Manfaat Penelitian.....	13
a. Secara Teoritis	13
b. Secara Praktis	14
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Kerangka Teori.....	15
B. Kerangka Operasional.....	27
C. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	27
D. Kerangka Pemikiran	29
E. Hipotesis.....	30
 BAB III METODE PENELITIAN	31

A. Pendekatan Penelitian.....	31
B. Populasi Dan Sampel.....	31
C. Latar Dan Waktu Penelitian.....	34
D. Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
1. Instagram sebagai Lokasi Penelitian	38
2. Profil Akun Instagram @Kumparancom.....	41
3. Objek Penelitian Spesifik.....	42
4. Periode Pengambilan Data.....	43
5. Karakteristik Kolom Komentar sebagai Ruang Publik Digital.....	44
B. Hasil Penelitian.....	45
1. Deskripsi Data Penelitian.....	45
2. Kategorisasi Komentar Berdasarkan Teori Resepsi Stuart Hall	48
3. Distribusi Frekuensi Kategorisasi	54
4. Interpretasi Hasil Penelitian	55
5. Temuan Tambahan	57
C. Pembahasan Penelitian	59
1. Analisis Dominasi Kategori Oppositional Position.....	59
2. Analisis Kategori Negosiasi Sebagai Posisi Tengah	62
3. Analisis Kategori Dominant-Hegemonic Position.....	64
4. Instagram Sebagai Ruang Publik Digital Dan Dinamika Komunikasi Politik.....	65
5. Implikasi Terhadap Komunikasi Politik Di Indonesia	68
6. Relevansi Dengan Teori Resepsi Stuart Hall.....	69
7. Keterbatasan Penelitian Dan Rekomendasi Penelitian Lanjutan	71
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
1. Validasi Hipotesis Penelitian	74
2. Karakteristik Respon Publik Dalam Setiap Kategori	75
3. Tema-Tema Dominan Dalam Diskursus Publik	77
4. Fungsi Instagram Sebagai Ruang Publik Digital	78

5. Relevansi Teori Resepsi Stuart Hall Dalam Konteks Digital	79
6. Implikasi Terhadap Kepercayaan Publik Dan Legitimasi Institusi....	81
7. Kontribusi Penelitian Terhadap Ilmu Komunikasi.....	81
8. Refleksi Tentang Demokrasi Digital Di Indonesia	82
B. Saran	85
1. Saran Untuk Mahkamah Konstitusi Dan Lembaga Peradilan	85
2. Saran Untuk Pemerintah Dan Pembuat Kebijakan.....	87
3. Saran Untuk Media Massa Dan Jurnalis.....	88
4. Saran Untuk Platform Media Sosial	90
5. Saran Untuk Masyarakat Dan Pengguna Media Sosial	91
6. Saran Untuk Institusi Pendidikan	92
7. Saran Untuk Partai Politik Dan Politisi	93
8. Saran Untuk Penelitian Lanjutan.....	94
9. Penutup	96
Daftar Pustaka	xviii
Lampiran	xxi

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 2.1	Kategori Stuart Hall.....	25
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	25
Tabel 3.1	Waktu Penelitian	32
Tabel 4.1	Distribusi Kategorisasi Komentar	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1.1 Pengguna Instagram Di Indonesia.....	3
Gambar 2.1 Unggahan @kumparancom	28
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	27
Gambar 4.1 Data Pengguna instagram	37
Gambar 4.2 Grafik Frekuensi Komentar Berdasarkan Kategorisasi.....	53

ABSTRAK

Oposisi Komentar Unggahan Instagram @Kumparancom (Studi Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Capres-Cawapres).

Cahyono Putra
199110184

Penelitian ini menelaah bentuk oposisi netizen dalam kolom komentar unggahan Instagram @kumparancom yang membahas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden, dengan berlandaskan Teori Resepsi Stuart Hall. Melalui pendekatan analisis isi kuantitatif terhadap 232 komentar yang dihimpun, temuan penelitian memperlihatkan dominasi kategori oppositional position sebesar 45,89% (106 komentar), diikuti oleh negotiated position sebesar 44,83% (104 komentar), sementara kategori dominant-hegemonic position hanya mencapai 9,48% (22 komentar).

Komposisi tersebut merefleksikan tingginya gelombang ketidakpuasan publik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini tercermin dari wacana yang mengemuka dalam komentar, seperti dugaan politisasi institusi peradilan, sorotan terhadap ketidakadilan prosedural, serta kecemasan atas menguatnya praktik dinasti politik.

Penelitian ini sekaligus menegaskan relevansi Teori Resepsi Stuart Hall dalam lanskap komunikasi digital kontemporer, serta menempatkan Instagram sebagai ruang publik digital yang memfasilitasi partisipasi politik secara masif. Namun demikian, temuan juga memperlihatkan kecenderungan polarisasi opini dan intensitas emosional yang tinggi, sehingga menegaskan urgensi literasi digital dan kemampuan bernalar kritis masyarakat dalam merespons diskursus politik di ruang digital Indonesia.

Kata Kunci : Oposisi Netizen, Instagram, Mahkamah Konstitusi, Komunikasi Politik Digital

ABSTRACT

Opposition in Instagram @kumparancom Post Comments (A Study on the Constitutional Court Decision Regarding Presidential and Vice-Presidential Age Limits).

Cahyono Putra
199110184

This study analyzes netizen opposition in Instagram @kumparancom post comments regarding Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 on presidential and vice-presidential age limits using Stuart Hall's Reception Theory. Employing quantitative content analysis of 232 comments collected, the research findings reveal the dominance of oppositional position category at 45.89% (106 comments), negotiated position category at 44.83% (104 comments), and dominant-hegemonic position at only 9.48% (22 comments), indicating significant public dissatisfaction with the MK decision characterized by dominant themes of judicial politicization accusations, procedural injustice criticism, and concerns about political dynasty practices. This research validates the relevance of Stuart Hall's Reception Theory in digital contexts and underscores Instagram's function as a digital public sphere facilitating mass political participation, while demonstrating tendencies toward opinion polarization and high emotionality, thereby emphasizing the importance of digital literacy and critical thinking abilities among Indonesian society in digital political discourse.

Key Words : *Netizen Opposition, Instagram, Constitutional Court, Digital Political Communication*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penelitian

Media sosial, khususnya Instagram, telah menjadi ruang publik yang penting untuk diskusi dan penyampaian pendapat di era digital saat ini. Instagram tidak hanya berfungsi sebagai platform berbagi foto dan video, tetapi juga sebagai medium interaksi sosial yang mendukung partisipasi masyarakat dalam berbagai isu. Dalam konteks ini, media sosial berperan sebagai saluran aspirasi kewargaan yang memungkinkan individu untuk menyampaikan pandangan dan berinteraksi dengan orang lain secara luas (Arianto, 2021).

Instagram merupakan media sosial yang paling populer pada zaman sekarang. Pengguna yang dimulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa turut mendongkrak popularitas Instagram. Sentimen analisis diusulkan dengan menganalisis teks pada kolom komentar yang dikemukakan masyarakat pada akun instagram terutama terkait kebijakan pemerintah (Arianto, 2021).

Lebih lanjut, Instagram sebagai ruang publik juga berfungsi untuk membangun komunitas dan memperkuat hubungan antar individu. Dalam penelitian mengenai ruang publik, interaksi sosial yang terjadi di ruang tersebut sangat penting untuk menciptakan kohesi sosial (Siregar, 2021). Instagram, dengan fitur-fitur seperti komentar, DM (Direct Message), dan story, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara langsung, berbagi pengalaman, dan membangun jaringan sosial yang lebih luas. Hal ini

menciptakan lingkungan di mana individu merasa lebih terhubung dan memiliki suara dalam komunitas mereka.

Selain itu, media sosial seperti Instagram juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Penggunaan media sosial oleh pemerintah daerah di Indonesia, meskipun belum optimal, menunjukkan potensi besar untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat (Rahmanto, 2022). Dengan memanfaatkan Instagram, pemerintah dapat menyampaikan informasi secara langsung kepada publik, menerima umpan balik, dan menjawab pertanyaan dari masyarakat, sehingga menciptakan ruang dialog yang lebih terbuka dan responsif (Sukarno et al., 2021)

Dalam konteks pendidikan, media sosial juga berperan penting dalam manajemen opini publik. Institusi pendidikan menggunakan platform ini untuk berkomunikasi dengan siswa, orang tua, dan masyarakat luas, yang pada gilirannya dapat memengaruhi citra dan reputasi mereka (Haromain, 2023). Ini menunjukkan bahwa Instagram tidak hanya sebagai alat untuk berbagi konten, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk membangun komunikasi yang efektif antara berbagai pihak.

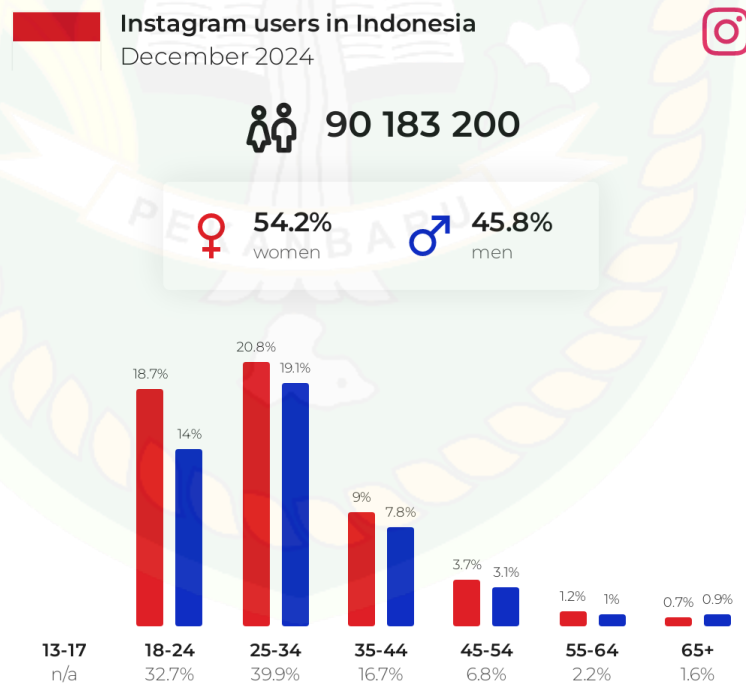
Secara keseluruhan, Instagram sebagai ruang publik memiliki peran yang signifikan dalam mendukung diskusi dan penyampaian pendapat. Dengan kemampuannya untuk menghubungkan orang-orang, memfasilitasi interaksi sosial, dan meningkatkan partisipasi publik, Instagram menjadi alat yang sangat

berharga dalam membangun masyarakat yang lebih terlibat dan responsif terhadap isu-isu yang ada.

Penggunaan Instagram di Indonesia menunjukkan tren yang signifikan, baik dari segi jumlah pengguna maupun demografi. Menurut data terbaru, Indonesia memiliki sekitar 90.183.200 pengguna Instagram, yang merupakan 31,8 % dari seluruh populasi di Indonesia. Hal ini menempatkan Indonesia di peringkat keempat secara global dalam jumlah pengguna Instagram, dengan proporsi pengguna perempuan mencapai 54,2% dan laki-laki 45,8% .

Gambar 1.1

Pengguna Instagram



Demografi pengguna Instagram di Indonesia didominasi oleh mereka yang berusia antara 25 hingga 34 tahun dengan jumlah 36.000.000 pengguna. Perbedaan tertinggi antara pria dan wanita terjadi pada orang berusia 18 hingga 24 tahun, di mana wanita memimpin dengan 12.600.000. Dalam penelitian Sutrisno (2021) mengungkapkan bahwa pengguna Instagram cenderung menggunakan platform ini untuk memenuhi kebutuhan informasi dan berinteraksi dengan konten yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka (Sutrisno & Mayangsari, 2021)

Lebih jauh lagi, Instagram berfungsi sebagai alat komunikasi yang efektif, di mana pengguna dapat berbagi informasi dalam bentuk foto dan video, serta berinteraksi dengan pengguna lain (Sari & Basit, 2020). Hal ini menciptakan lingkungan di mana pengguna dapat mengekspresikan diri dan membangun jaringan sosial yang lebih luas. Penelitian menunjukkan bahwa pengguna Instagram tidak hanya menggunakan platform ini untuk bersosialisasi, tetapi juga untuk mendapatkan informasi edukatif dan hiburan. (Rahmayanti & Ediati, 2022)

Dalam konteks ini, Instagram juga berperan dalam pemasaran digital, di mana banyak brand memanfaatkan platform ini untuk menjangkau audiens yang lebih luas, terutama di kalangan generasi muda yang aktif di media sosial (Ernayani et al., 2021). Dengan demikian, Instagram tidak hanya menjadi ruang untuk berbagi konten, tetapi juga sebagai alat strategis untuk komunikasi dan pemasaran.

Secara keseluruhan, statistik penggunaan Instagram di Indonesia menunjukkan bahwa platform ini memiliki dampak yang besar dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Dengan jumlah pengguna yang terus meningkat, Instagram akan terus menjadi ruang publik yang penting untuk interaksi sosial dan penyampaian informasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di Indonesia merupakan salah satu keputusan yang sangat signifikan dalam konteks politik dan hukum. Dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, MK memutuskan untuk mempertahankan batas usia minimal 40 tahun bagi capres dan cawapres, yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Paradita & Triadi, 2024). Keputusan ini diambil setelah adanya gugatan yang diajukan oleh sejumlah pihak yang menganggap bahwa batas usia tersebut tidak relevan dengan dinamika sosial dan politik saat ini, serta menghambat partisipasi generasi muda dalam kepemimpinan (Sugitanata, 2023)

Konteks hukum dari putusan ini berakar pada prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan yang diatur dalam konstitusi. MK berargumen bahwa batas usia tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa calon pemimpin memiliki pengalaman dan kedewasaan yang cukup dalam mengelola negara (Sugitanata, 2023). Namun, keputusan ini juga mencerminkan tantangan dalam menyeimbangkan antara kebutuhan akan pengalaman dan aspirasi generasi muda yang ingin terlibat dalam politik. Dalam konteks politik, keputusan ini dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga stabilitas dan kontinuitas dalam

kepemimpinan, tetapi juga dapat dianggap sebagai penghalang bagi calon-calon muda yang memiliki potensi untuk memimpin (Paradita & Triadi, 2024)

Dampak dari putusan ini terhadap pemilihan umum dan calon pemimpin di Indonesia sangat signifikan. Pertama, keputusan ini dapat mempengaruhi dinamika pemilihan presiden 2024, di mana calon-calon yang lebih muda mungkin merasa terpinggirkan karena batasan usia yang ketat (Sugitanata, (2023) dan Paradita (2024). Hal ini dapat mengurangi keragaman dalam pilihan calon yang tersedia bagi pemilih. Selain itu, keputusan ini juga dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap MK sebagai lembaga yang berwenang dalam menafsirkan konstitusi dan undang-undang, terutama jika masyarakat merasa bahwa keputusan tersebut tidak mencerminkan aspirasi mereka (Pangidoan et al., 2024).

Selanjutnya, keputusan ini juga berpotensi mempengaruhi partisipasi politik generasi muda. Jika generasi muda merasa bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin, hal ini dapat mengurangi minat mereka untuk terlibat dalam politik secara keseluruhan (Sugitanata, 2023). Oleh karena itu, penting bagi para pemangku kepentingan untuk mempertimbangkan bagaimana keputusan ini dapat mempengaruhi masa depan politik Indonesia dan untuk mencari cara agar generasi muda tetap terlibat dalam proses demokrasi, meskipun ada batasan usia yang ditetapkan. (Paradita & Triadi, 2024)

Secara keseluruhan, putusan MK mengenai batas usia capres dan cawapres mencerminkan kompleksitas dalam menyeimbangkan antara

pengalaman dan aspirasi generasi muda. Keputusan ini tidak hanya memiliki implikasi hukum, tetapi juga dampak yang luas terhadap dinamika politik dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum di Indonesia.

Memahami respon publik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sangat penting dalam konteks politik, karena respon tersebut mencerminkan dinamika interaksi antara masyarakat dan lembaga negara. Respon publik dapat memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan atau keputusan hukum diterima, ditolak, atau diperdebatkan oleh masyarakat. Hal ini juga berfungsi sebagai indikator legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan politik. Ketika masyarakat merasa bahwa suara mereka didengar dan dipertimbangkan, hal ini dapat meningkatkan partisipasi politik dan memperkuat demokrasi. (Saepudin et al, 2018).

Dalam ekosistem internet berkembang konsep computer mediated communication (CMC), yaitu pola komunikasi yang memungkinkan individu berinteraksi tanpa kehadiran fisik secara langsung. Melalui mekanisme ini, proses pertukaran pesan berlangsung dengan perantaraan perangkat digital yang menghubungkan para pengguna dalam ruang virtual. Kehadiran internet tidak hanya melahirkan jurnalisme daring, tetapi juga memicu kompetisi yang semakin intens antara media konvensional dan media sosial dalam memperebutkan perhatian publik. Situasi tersebut bahkan dipandang berkontribusi terhadap degradasi mutu jurnalisme online (Wendratama, 2017: 3).

Media sosial, pada saat yang sama, membuka ruang ekspresi yang relatif bebas bagi setiap individu untuk menyuarakan pendapatnya. Para pengguna aktif yang terlibat dalam komunikasi, pertukaran gagasan, serta kolaborasi di ruang digital

kemudian dikenal sebagai netizen. Fenomena ini sejalan dengan gagasan Jürgen Habermas dalam karyanya *The Structural Transformation of the Public Sphere* (1989), yang memperkenalkan Teori Ruang Publik. Teori tersebut menjelaskan adanya ruang komunikatif tempat ide, informasi, dan opini berkelindan sebagai bentuk respons masyarakat terhadap otoritas publik (Nasrullah, 2019: 2–104).

Teori Representasi dan Teori Pemaknaan yang digagas oleh Stuart Hall, seorang pemikir kajian media asal Inggris, menyoroti peran media sebagai arena produksi makna yang berpengaruh terhadap konstruksi persepsi publik. Melalui dua kerangka tersebut, media tidak dipandang sekadar sebagai saluran penyampai informasi, melainkan sebagai ruang simbolik yang membentuk cara masyarakat menafsirkan realitas sosial. Dalam konteks komunikasi berbasis teknologi, proses pertukaran pesan dapat berlangsung hanya dengan perantaraan perangkat yang menyerupai atau berbasis komputer, tanpa menuntut kehadiran fisik antarindividu.

Respons masyarakat terhadap isu politik dapat diamati dalam berbagai peristiwa besar di Indonesia. Salah satu contohnya adalah kasus penistaan agama yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada tahun 2018, yang memicu reaksi publik secara luas, baik dalam bentuk dukungan maupun penolakan. Media sosial menjadi medium utama bagi masyarakat untuk mengekspresikan sikap dan pandangan mereka, yang pada akhirnya melahirkan polarisasi di antara kelompok dengan orientasi berbeda (Rozi & Firman, 2018). Dalam situasi tersebut, media sosial berfungsi sebagai ruang publik digital tempat opini diproduksi, dipertukarkan, dan disebarluaskan dengan sangat cepat, sehingga turut membentuk persepsi kolektif masyarakat terhadap isu yang sedang berkembang.

Selain itu, respon publik terhadap program vaksinasi COVID-19 juga menunjukkan bagaimana masyarakat dapat bereaksi terhadap kebijakan

pemerintah. Penelitian menunjukkan bahwa opini publik mengenai vaksinasi bervariasi, dengan sentimen positif meningkat seiring dengan kampanye informasi yang lebih baik (Yusyah, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif dari pemerintah dapat mempengaruhi persepsi dan sikap masyarakat terhadap kebijakan kesehatan publik.

Dalam kasus putusan MK mengenai batas usia capres dan cawapres, respon publik juga terlihat melalui berbagai platform media sosial. Banyak masyarakat yang menyuarakan pendapat mereka tentang relevansi batas usia tersebut, dengan beberapa pihak menganggapnya sebagai penghalang bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam politik (Sitorusa et al., 2024). Diskusi ini mencerminkan keinginan masyarakat untuk melihat perubahan dalam sistem politik yang lebih inklusif dan representatif.

Secara keseluruhan, respon publik terhadap putusan MK dan isu-isu politik lainnya sangat penting untuk dipahami. Respon ini tidak hanya mencerminkan sikap masyarakat terhadap kebijakan tertentu, tetapi juga dapat mempengaruhi arah kebijakan dan keputusan politik di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi para pemangku kepentingan untuk memperhatikan dan merespons opini publik dalam proses pengambilan keputusan.

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Bertolak dari uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan sejumlah persoalan yang berkaitan dengan respons publik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perubahan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil

presiden, khususnya yang tercermin dalam kolom komentar media sosial Instagram @kumparancom.

1. Putusan MK tentang penurunan batas usia minimal capres-cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun telah memunculkan perdebatan publik yang intens di ruang digital. Perdebatan ini tidak hanya menyangkut aspek legal-formal dari putusan tersebut, tetapi juga berkaitan dengan persepsi publik tentang kematangan dan kapabilitas kepemimpinan berdasarkan faktor usia. Dinamika ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana publik merespons perubahan regulasi yang berpotensi mengubah lanskap politik nasional.
2. Fenomena partisipasi politik digital melalui kolom komentar Instagram menunjukkan adanya transformasi dalam cara masyarakat menyuarakan aspirasi politiknya. Platform media sosial telah menciptakan ruang publik baru yang memungkinkan terjadinya deliberasi politik secara lebih terbuka dan dinamis. Namun, karakteristik komunikasi di media sosial yang cenderung reaktif dan emosional memunculkan tantangan tersendiri dalam memahami substansi dari respons publik tersebut.
3. Sebagai media daring yang memiliki basis pengikut yang signifikan, unggahan @kumparancom terkait putusan MK ini mendapat respons beragam dari publik. Respons tersebut tidak hanya mencerminkan pendapat pribadi warganet, tetapi juga dapat menjadi indikator dari sentimen publik yang lebih luas terhadap isu politik strategis. Hal ini memunculkan

kebutuhan untuk menganalisis pola dan karakteristik respons tersebut secara sistematis.

4. Dalam konteks tahun politik menjelang Pemilu 2024, putusan MK ini berpotensi mempengaruhi dinamika politik nasional. Analisis terhadap respons publik di media sosial dapat memberikan gambaran tentang bagaimana masyarakat memandang perubahan regulasi elektoral dan implikasinya terhadap masa depan politik Indonesia.
5. Sebagai ruang publik digital, kolom komentar Instagram memiliki karakteristik khusus yang mempengaruhi cara orang berinteraksi dan menyampaikan pendapat. Pola komunikasi yang terbentuk di platform ini dapat mempengaruhi kualitas diskursus politik dan cara masyarakat memahami isu-isu politik strategis.

C. Pembatasan Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, penelitian ini akan memfokuskan analisisnya pada respons publik yang termanifestasi dalam komentar-komentar pada unggahan akun Instagram @kumparancom terkait putusan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan batas usia minimal capres-cawapres. Secara spesifik, penelitian ini membatasi ruang lingkup analisisnya pada unggahan yang dipublikasikan pada tanggal 16 Oktober 2023, yaitu pada hari dikeluarkannya putusan MK tersebut. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis isi komentar dengan memperhatikan tiga aspek utama. Pertama, penelitian akan mengkaji sentimen yang terkandung dalam komentar-komentar

tersebut, baik yang bersifat positif, negatif, maupun netral terhadap putusan MK. Kedua, penelitian akan mengidentifikasi tema-tema dominan yang muncul dalam diskursus publik terkait putusan tersebut. Ketiga, penelitian akan menganalisis bagaimana komentar-komentar tersebut mencerminkan pola partisipasi politik masyarakat di ruang digital. Fokus Pembatasan penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal. Pemilihan akun @kumparancom sebagai sumber data didasarkan pada posisinya sebagai salah satu media daring terkemuka di Indonesia yang memiliki basis pengikut yang signifikan dan secara aktif memberitakan isu-isu politik nasional. Pembatasan waktu pada tanggal 16 Oktober 2023 dipilih untuk menangkap respons publik yang paling immediate dan spontan terhadap putusan tersebut, sebelum terpengaruh oleh berbagai interpretasi dan analisis yang muncul kemudian. Dalam melakukan analisis, penelitian ini akan mengabaikan komentar-komentar yang tidak substansial seperti komentar yang hanya berisi tautan, emoticon, atau spam. Fokus akan diberikan pada komentar-komentar yang memiliki konten tekstual yang dapat dianalisis untuk memahami respons publik terhadap putusan MK tersebut. Dengan pembatasan fokus ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mendalam dan komprehensif tentang bagaimana publik merespons kebijakan politik strategis melalui media sosial, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang karakteristik partisipasi politik digital di Indonesia kontemporer.

D. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian penjelasan diatas maka rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah: bagaimana oposisi netizen dalam komentar unggahan putusan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan batas usia minimal capres-cawapres di Instagram @kumparancom.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi oposisi netizen dalam komentar unggahan putusan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan batas usia minimal capres-cawapres di Instagram @kumparancom.

2. Manfaat penelitian

a. Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu komunikasi, khususnya dalam kajian komunikasi politik di era digital. Hasil penelitian ini dapat memperkaya pemahaman tentang teori ruang publik digital (*digital Public Sphere*) dalam konteks Indonesia, terutama terkait bagaimana media sosial berperan sebagai wadah diskursus politik kontemporer. Penelitian ini juga memberikan landasan empiris tentang pola partisipasi politik masyarakat di ruang digital, yang dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang komunikasi politik dan media sosial. Lebih

lanjut, temuan penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan metodologi analisis isi dalam konteks media sosial, khususnya dalam mengkaji respons publik terhadap isu-isu politik strategis.

b. Secara praktis

Memberikan Secara praktis, penelitian ini memberikan beberapa manfaat bagi berbagai pemangku kepentingan. Bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam memahami respons dan sentimen publik terhadap kebijakan-kebijakan strategis, khususnya yang berkaitan dengan regulasi pemilihan. Bagi media massa dan praktisi komunikasi, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana publik merespons pemberitaan isu-isu politik di media sosial, yang dapat membantu dalam pengembangan strategi penyampaian informasi yang lebih efektif. Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang dinamika diskursus politik di media sosial dan pentingnya partisipasi yang konstruktif dalam diskusi publik. Selain itu, bagi akademisi dan peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan penelitian lanjutan terkait komunikasi politik di era digital.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teori *Public Sphere*

Istilah public sphere atau ruang publik diperkenalkan oleh Jürgen Habermas melalui karyanya *The Structural Transformation of the Public Sphere* yang terbit pada tahun 1989. Dalam gagasan tersebut, Habermas memaparkan keberadaan suatu ruang komunikatif yang menjadi wadah pertemuan ide, pertukaran informasi, serta pembentukan opini publik sebagai bentuk respons terhadap otoritas kekuasaan (Nasrullah, 2019:16). Lebih jauh, Habermas menguraikan dinamika keruntuhan rasionalitas publik yang bersifat kritis serta proses transformasi ruang publik yang berlangsung pada abad ke-19 hingga abad ke-20, khususnya di negara-negara seperti Prancis, Jerman, dan Inggris. Perubahan tersebut menandai pergeseran fungsi ruang publik dari arena diskursus rasional menuju ruang yang semakin dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi, politik, dan media massa.

Jejak awal ruang publik dapat ditelusuri ke abad ke-18, tepatnya pada masa bergulirnya revolusi di Prancis dan Amerika. Peristiwa-peristiwa tersebut tidak hanya mengubah tatanan politik, tetapi juga menggeser posisi masyarakat dari sekadar penonton menjadi pihak yang terlibat dalam perbincangan tentang urusan bersama. Diskusi-diskusi terbuka mulai bermunculan, memungkinkan warga memperdebatkan berbagai persoalan publik dan turut memengaruhi arah pengambilan keputusan.

Di Prancis, situasi pascarevolusi melahirkan ruang-ruang pertemuan yang berfungsi sebagai arena pertukaran gagasan. Tempat-tempat seperti salon intelektual, kedai kopi, dan forum diskusi menjadi pusat interaksi warga yang semakin peduli terhadap persoalan negara. Dari ruang-ruang inilah tumbuh kesadaran publik yang lebih kritis, di mana masyarakat tidak lagi pasif menerima kebijakan, tetapi aktif menilai, menanggapi, dan membicarakan isu-isu yang berkembang pada masa tersebut.

Habermas (2019) memandang ruang publik bukan sebagai tempat yang bersifat fisik semata, melainkan setiap ruang yang memungkinkan terbentuknya opini bersama dapat dikategorikan sebagai ruang publik. Dengan pengertian tersebut, ruang publik dapat hadir dalam berbagai bentuk, selama di dalamnya terjadi pertukaran gagasan, perdebatan, serta pembentukan pandangan kolektif. Dalam konteks era milenial, internet kemudian muncul sebagai manifestasi baru dari ruang publik. Melalui jaringan digital, individu dapat menyampaikan pendapat, berinteraksi, serta membangun komunikasi dengan pengguna lain tanpa batasan ruang dan waktu. Ruang publik tidak lagi terbatas pada forum fisik, tetapi bertransformasi ke dalam ruang virtual yang bersifat terbuka dan dinamis.

Salah satu wujud konkret ruang publik digital tersebut dapat dilihat pada kolom komentar. Fitur ini menjadi arena ekspresi bagi masyarakat untuk menanggapi informasi yang beredar di internet. Di dalam kolom komentar, publik memiliki kebebasan untuk menyampaikan pandangan, kritik, maupun dukungan terhadap suatu isu, sehingga terbentuk arus opini yang beragam dalam ruang digital.

2. Analisis Sentimen

Analisis sentimen merupakan suatu pendekatan yang berfungsi untuk menelisik kecenderungan opini, sikap, serta emosi yang tersirat di dalam teks. Dalam ranah media sosial, metode ini digunakan untuk memetakan arah respons publik terhadap suatu isu, termasuk isu politik, dengan menafsirkan kecenderungan penilaian yang muncul dalam percakapan digital. Analisis sentimen, yang juga dikenal sebagai opinion mining, merujuk pada proses komputasional yang bertujuan mengekstraksi, mengolah, dan menafsirkan data tekstual secara otomatis guna mengidentifikasi muatan sentimen dalam sebuah pernyataan. Melalui proses tersebut, dapat diketahui apakah suatu opini mengarah pada penilaian yang bersifat positif maupun negatif terhadap objek tertentu (Liu, 2022). Ditinjau dari sumber datanya, analisis sentimen umumnya dibedakan ke dalam beberapa tingkatan, antara lain analisis pada level dokumen dan analisis pada level kalimat.

Analisis sentimen dapat dipandang sebagai salah satu cabang paling populer dalam ranah Natural Language Processing (NLP). Bidang ini berfokus pada upaya merancang sistem komputer yang mampu memproses bahasa manusia, sehingga mesin dapat memahami, menafsirkan, bahkan merespons bahasa secara mendekati cara berpikir manusia. Natural Language Processing sendiri merupakan bagian dari Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan, yakni disiplin yang berupaya menghadirkan kemampuan kognitif manusia ke dalam sistem komputasi. Dalam

perkembangan data mining, Artificial Intelligence menempati posisi sebagai salah satu dari empat cabang utama, berdampingan dengan statistika, basis data, serta pencarian informasi. Dalam praktiknya, AI tidak dapat dilepaskan dari machine learning sebagai mekanisme pembelajaran algoritmik. Machine learning berfungsi menggantikan peran manusia dalam proses pengambilan keputusan dengan mengandalkan pola yang diperoleh dari data. Berbeda dengan manusia yang dipengaruhi emosi, sistem machine learning menghasilkan keputusan berdasarkan hasil pengolahan data yang bersifat objektif (Saputra, 2022).

Analisis sentimen merupakan proses komputasional yang memanfaatkan teknik analisis teks untuk mengolah data berbentuk tulisan, dengan tujuan mengidentifikasi, memahami, serta mengelompokkan muatan emosi ke dalam kategori positif maupun negatif. Metode ini semakin banyak digunakan seiring meningkatnya kebutuhan individu maupun organisasi untuk mengetahui kecenderungan opini publik terhadap suatu objek atau isu. Proses analisis sentimen juga sangat dipengaruhi oleh jenis dataset yang digunakan, karena setiap karakter data memerlukan penanganan yang berbeda (Widayat, 2021). Penerapannya tidak hanya terbatas pada kepentingan personal, tetapi juga dimanfaatkan oleh lembaga atau institusi. Analisis sentimen, yang kerap disebut sebagai opinion mining, merupakan proses penentuan kecenderungan emosi pengguna melalui penelaahan teks yang mereka hasilkan. Tidak hanya digunakan untuk menilai tokoh tertentu, metode ini juga dapat diterapkan pada

berbagai konteks seperti bisnis, program, produk, aplikasi, maupun isu publik lainnya yang memunculkan tanggapan masyarakat (Herlinawati et al., 2020). Keunggulan utama analisis sentimen terletak pada kemampuannya menghemat waktu dan tenaga dalam penelitian yang melibatkan data berjumlah besar.

Penerapan analisis sentimen dapat ditemukan dalam berbagai bidang, antara lain:

1. Bidang bisnis, misalnya untuk menilai reputasi suatu merek atau produk baru di mata masyarakat sehingga dapat menjadi dasar strategi peningkatan citra merek.
2. Bidang politik, misalnya untuk mengukur tingkat popularitas atau citra seorang tokoh, sehingga dapat memberikan gambaran tentang persepsi publik terhadap figur tersebut.
3. Bidang program publik, seperti vaksinasi, penanganan COVID-19, atau pemilihan presiden, yang bertujuan menilai tanggapan masyarakat sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan.

3. Respon Positif dan Respon Negatif

Menurut Effendy (1984), respons dapat dipahami sebagai wujud reaksi yang muncul pada diri komunikan setelah ia menerima pesan dari komunikator. Respons tersebut menjadi indikator bagaimana pesan dimaknai, diterima, atau bahkan ditolak oleh penerimanya. Respons positif tercermin melalui tanggapan yang menunjukkan pemahaman, persetujuan,

serta kecenderungan untuk mendukung atau berpartisipasi dalam arah pembahasan yang ditawarkan komunikator. Dalam konteks penelitian ini, respons positif tampak pada komentar yang menerima, menyetujui, atau memperkuat isi informasi yang disampaikan dalam unggahan akun Instagram @kumparancom. Sebaliknya, respons negatif merepresentasikan sikap penolakan, ketidaksetujuan, maupun ekspresi ketidaksukaan terhadap pesan yang diterima. Dalam penelitian ini, respons negatif termanifestasi melalui komentar yang mengandung kritik, penolakan, atau ketidakpuasan terhadap isi informasi yang dipublikasikan oleh akun Instagram @kumparancom.

4. Komunikasi Politik

Untuk menelaah ruang lingkup komunikasi politik, terlebih dahulu perlu dipahami keterjalinan antara disiplin komunikasi dan ilmu politik. Dalam kerangka ilmu politik, komunikasi berperan sebagai fondasi yang memungkinkan berbagai kepentingan, strategi, serta agenda kekuasaan disampaikan dan diproyeksikan ke ruang publik. Politik tidak dapat berdiri tanpa proses komunikasi, sebagaimana komunikasi kerap berlangsung dalam konteks relasi kekuasaan dan aktivitas politik.

Komunikasi politik pada dasarnya merupakan irisan antara dua disiplin tersebut, dengan fokus pada bagaimana pesan-pesan politik dirancang, disampaikan, dan dimaknai oleh publik. Bidang ini menyoroti strategi komunikasi yang digunakan para pemangku kepentingan dalam memperjuangkan tujuan dan kepentingan politiknya. Seiring dinamika

masyarakat yang terus berubah, pola dan metode komunikasi politik pun mengalami transformasi. Oleh sebab itu, kajian serta penyesuaian dalam komunikasi politik terus berkembang untuk menemukan pendekatan yang paling relevan dalam memahami praktik komunikasi politik kontemporer.

5. Media Komunikasi Politik

Media sosial dapat dipahami sebagai medium komunikasi berbasis internet yang memungkinkan penggunanya berinteraksi secara fleksibel sekaligus menampilkan identitas diri secara selektif, baik secara langsung maupun kepada audiens yang luas, sebagai sarana memperoleh nilai dari relasi sosial yang terbangun (Carr & Hayes, 2015: 50). Unsur utama media sosial terletak pada nilai yang dihasilkan melalui aktivitas produksi konten, konsumsi informasi, serta persepsi interaksi dengan pengguna lain. Media sosial juga mempertemukan karakter komunikasi massa dan komunikasi antarpribadi dalam satu wadah, sehingga melahirkan bentuk komunikasi yang bersifat massa-pribadi. Nilai yang muncul dalam bentuk komunikasi tersebut berkaitan erat dengan ekspektasi penggunanya, sehingga setiap platform media sosial dirancang untuk memenuhi kebutuhan individu secara berbeda, sesuai dengan karakteristik fitur yang dimilikinya (Velasquez & Rojas, 2017: 3).

Seiring dengan kemudahan akses dan penggunaannya yang meluas di berbagai lapisan masyarakat, media sosial menjadi medium yang semakin strategis dalam ranah politik (Daşlı, 2019: 243). Platform ini menarik perhatian karena tingkat aksesibilitasnya yang tinggi serta atmosfer

komunikasinya yang relatif bebas, sehingga dinilai efektif sebagai saluran komunikasi politik (Daşli, 2019: 244). Perkembangan teknologi Web 2.0 turut mempercepat transformasi ini, karena memungkinkan pengguna internet memproduksi konten mereka sendiri. Melalui blog politik maupun forum diskusi daring, masyarakat dapat mengekspresikan pandangan, terlibat dalam perdebatan, serta memengaruhi sikap politik pengguna lain tanpa batasan yang ketat. Kondisi tersebut menyebabkan peran jurnalis profesional sebagai gatekeeper yang menyeleksi informasi sebelum dipublikasikan di media konvensional menjadi semakin berkurang. Intensitas penggunaan media sosial yang tinggi akhirnya memberikan pengaruh signifikan terhadap relevansi wacana publik berbasis internet dalam lanskap politik, terutama di negara-negara yang menganut sistem demokrasi (Howard dalam Stieglitz et al., 2021: nn).

6. Instagram sebagai media komunikasi politik.

Gelombang kemodernan yang merambah ruang komunikasi politik telah membuka lembaran baru dalam cara manusia mengelola kampanye, menghimpun sokongan dana, menggerakkan massa, serta mengumpulkan kabar dan informasi (Poulakidakos & Veneti, 2018: 120). Di tengah arus perubahan tersebut, muncullah Instagram sebagai salah satu wahana yang dalam satu dasawarsa terakhir meresap ke pelbagai sendi kehidupan masyarakat. Berdasarkan catatan Napoleon Cat pada rentang Januari hingga Mei 2020, jumlah pengguna Instagram di Indonesia mencapai sekitar 69,2 juta jiwa. Besarnya arus pengguna dengan latar yang beraneka menjadikan

platform ini sebagai medan baru bagi para politisi untuk menata ruang komunikasi massa dalam jagat maya.

Pesona Instagram bertumpu pada kekuatan visual yang memikat pandangan. Platform ini menonjolkan gambar dan rekaman singkat sebagai sarana utama penyampaian pesan. Selain itu, Instagram senantiasa menyesuaikan diri dengan selera zaman melalui pembaruan fitur yang disenangi khalayak (Caliandro & Graham, 2020: 2). Hadirnya fitur video pendek, Instagram Stories, shoppable post, hingga IGTV menjadi bukti bagaimana platform ini terus berbenah mengikuti arus kebutuhan pengguna. Sebagai wahana berbagi gambar dan video, Instagram seakan menghadirkan ruang pribadi bagi setiap penggunanya, bahkan melalui unggahan yang bersifat sederhana. Dari situlah perlahan terbentuk citra diri yang tampak alami, seolah-olah kepribadian seseorang terlukis dengan sendirinya di dalam ruang digital tersebut.

Sifat personal yang melekat pada penggunaan Instagram memberikan keleluasaan bagi tiap individu untuk menampilkan jati dirinya. Di sisi lain, kemudahan arus informasi dan jaringan antarpengguna membuat platform ini memiliki watak yang berbeda dibandingkan media visual lainnya. Interaksi yang cepat dan bersifat pribadi itu lambat laun membentuk ruang sosial yang terpecah ke dalam kelompok-kelompok pandangan yang berbeda. Selain itu, himpunan data pengguna yang tersimpan dalam sistem Instagram memudahkan penyebaran iklan secara terarah. Kemampuan menjangkau kelompok tertentu dengan tepat sasaran

menjadikan media sosial ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, termasuk kepentingan politik. Tak mengherankan jika media sosial kemudian menjadi alat kampanye yang jamak digunakan para politisi dalam setiap musim pemilihan (Fletcher & Park dalam Rahmat & Purnomo, 2020: 74).

Interaksi politik melalui media sosial dipandang memiliki jangkauan yang luas serta daya gaung yang tinggi, sehingga efektif dalam menanamkan citra diri seorang politisi. Upaya tersebut dijalankan melalui strategi komunikasi, perancangan pesan, serta kegiatan kampanye yang berfungsi sebagai sarana penggerak massa (Bossetta dalam Rahmat & Purnomo, 2020: 74). Dalam kenyataannya, politik tidak pernah terpisah dari kehidupan sehari-hari, sebab manusia cenderung memilih kelompok politik yang sejalan dengan keyakinannya, lalu menyebarkannya ke lingkungan yang lebih luas melalui jejaring sosial. Para politisi, khususnya yang hendak menarik simpati kaum muda, memanfaatkan media sosial sebagai alat propaganda guna memperluas dukungan.

Keterkaitan antara media sosial dan praktik politik pun kian erat dalam lanskap komunikasi masa kini. Luasnya jangkauan media sosial menjadi ladang sekaligus tantangan bagi para politisi dalam menampilkan diri di hadapan publik. Lin dan Himelboim (dalam Rahmat & Purnomo, 2020: 74) menyatakan bahwa media sosial memberi peluang bagi politisi untuk menampilkan kepaiawaian dalam membangun citra politik melalui interaksi langsung dengan masyarakat, yang tampak dari berbagai

tanggapan seperti jajak pendapat dan percakapan daring. Keadaan ini menuntut adanya profesionalitas, kejujuran, kredibilitas, serta sikap objektif dalam menyebarkan informasi. Cara membingkai pesan politik di media sosial pun berperan besar dalam mengukuhkan citra yang hendak ditampilkan.

Pada zaman internet yang serba terhubung ini, pemerintah dan para aktor politik tidak lagi memiliki kendali mutlak atas arus agenda politik sebagaimana masa lampau. Mereka dituntut untuk memahami beragam ruang perantara yang terus berkembang, sehingga kekuasaan atas alur isu menjadi semakin longgar. Keadaan tersebut memaksa politisi untuk lebih tanggap terhadap kehendak publik, serta menyusun siasat komunikasi lintas media agar tetap memiliki tempat dalam percaturan politik (Gurevitch et al., 2019: 173).

7. Unggahan Instagram @Kumparancom Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Capres-Cawapres

Gambar 2.1

Unggahan akun Instagram @Kumparancom



Pada gambar tersebut tampak bahwa Mahkamah Konstitusi telah menetapkan waktu pembacaan putusan terkait perkara gugatan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Sidang pengucapan putusan dijadwalkan berlangsung pada hari Senin, 16 Oktober 2023, pukul 10.00 WIB. Informasi tersebut tercantum dalam jadwal persidangan yang dikutip dari laman resmi Mahkamah Konstitusi pada Selasa, 10 Oktober.

Berbagai permohonan uji materi yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi itu kerap dikaitkan dengan figur yang berpotensi maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Salah satu nama yang sering disebut adalah Gibran Rakabuming, putra Presiden Joko Widodo, yang belum memenuhi ketentuan usia minimal 40 tahun apabila syarat tersebut tetap diberlakukan dalam pencalonan presiden maupun wakil presiden.

B. Kerangka Operasional

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan 3 (tiga) kategori dari Stuart Hall, yaitu Dominan, negosiasi, dan Oposisi. Berikut uraiannya :

Tabel 2.1
Kategori Stuart Hall

No	Kategori	Defenisi
1	Dominan	Khalayak dapat menerima dan menyetujui pesan sesuai apa yang dikehendaki pembuat pesan
2	Negosiasi	Khalayak cukup memahami pesan secara umum, akan tetapi terdapat pengecualian berdasarkan aturan yang dibuat oleh khalayak (audiens) sendiri.
3	Oposisi	Khalayak melakukan rumusan kembali dan membuat alternatif pesan, hal itu menandakan khalayak menerjemahkan pembacaan yang berlawanan terhadap isi pesan
4	Unggaha instagram @kuparancom	Unggahan yang dimuat pada tanggal 16 oktober 2023 mengenai <i>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden</i>

C. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu yang Relevan

No.	Penulis	Judul	Hasil penelitian
1	(Baser & Setiawan, 2021)	Oposisi Komentar Unggahan Instagram @Kumparancom (Studi Pada Informasi Larangan Penggunaan Masker Scuba)	Penelitian ini berlandaskan pada teori analisis isi kuantitatif, teori ruang publik, serta konsep oposisi yang dikemukakan oleh Stuart Hall. Pendekatan yang digunakan adalah metode kuantitatif untuk mengukur kecenderungan respons yang muncul dalam komentar netizen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebesar 58% atau sebanyak 105 komentar termasuk dalam kategori oposisi. Secara umum, isi komentar tersebut mengekspresikan penolakan terhadap informasi mengenai larangan penggunaan masker yang diunggah pada akun Instagram @kumparancom, karena dianggap tidak benar dan diduga sengaja disebar untuk

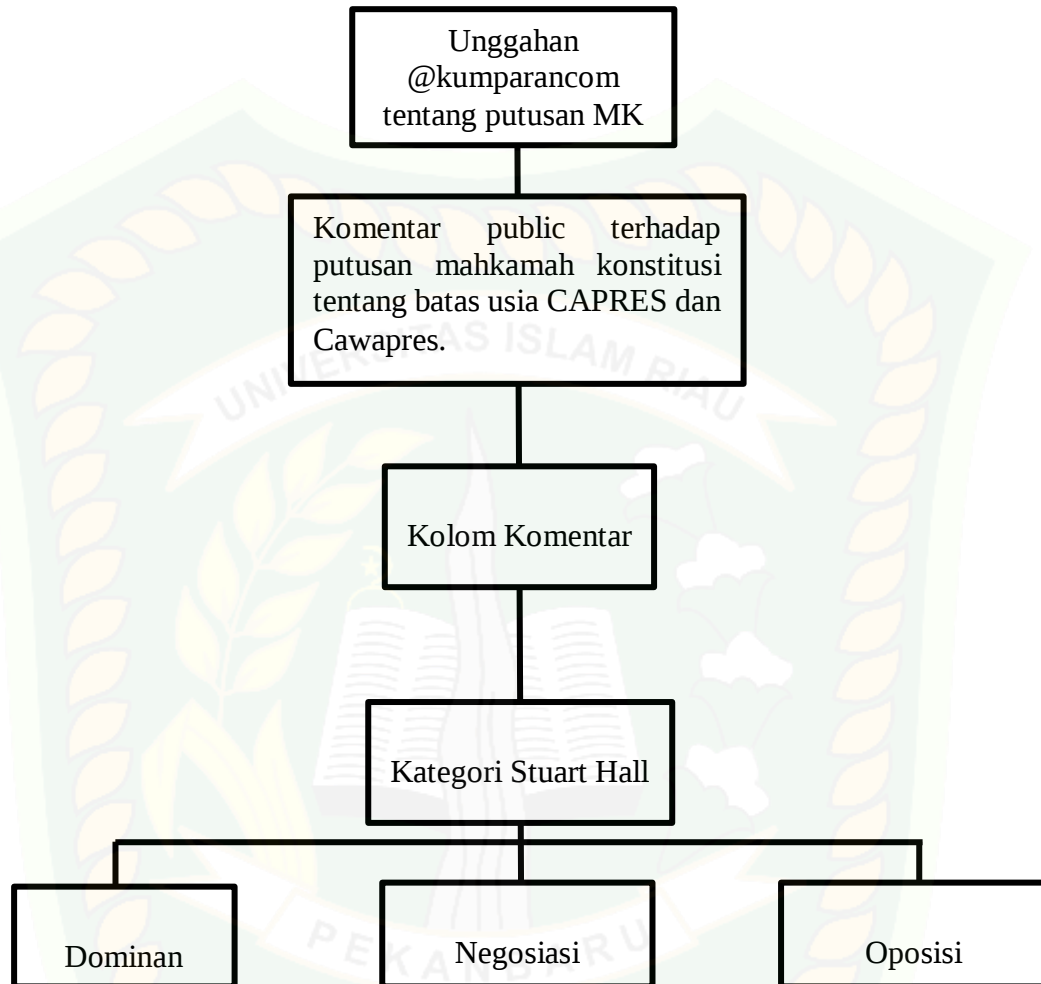
			mendorong kembali penjualan masker kesehatan.
2	(Pratama & Rivan, 2024)	Analisis Sentimen Pada Komentar Instagram Menggunakan Gaussian Naïve Bayes	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kelas sentimen negatif diperoleh nilai precision sebesar 82%, recall 78%, dan F1-score 79%. Sementara itu, pada kelas sentimen positif, nilai precision mencapai 79%, recall 82%, dan F1-score sebesar 80%.
3	(Samsir et al., 2021)	Analisis Sentimen Pembelajaran Daring Pada Twitter di Masa Pandemi COVID-19 Menggunakan Metode Naïve Bayes	Hasil temuan memperlihatkan bahwa percakapan mengenai pembelajaran daring lebih banyak diwarnai oleh sentimen negatif, yakni sebesar 69%, sedangkan sentimen positif hanya mencapai 30% dan sentimen netral berada pada angka 1% selama periode pengamatan. Dominasi sentimen negatif tersebut menandakan adanya rasa ketidakpuasan yang cukup kuat dari masyarakat terhadap pelaksanaan sistem pembelajaran daring. Hal ini tercermin dalam berbagai cuitan yang memuat ungkapan kekecewaan, di mana kata-kata seperti “stres” dan “malas” muncul dengan frekuensi yang tinggi dalam alur percakapan.
4	(Khairunisa et al., 2024)	Analisis Sentimen Komentar pada Postingan Instagram "StandWithUs" Menggunakan Klasifikasi Naive Baye	Temuan penelitian mengindikasikan bahwa model Naive Bayes, apabila dilatih menggunakan data yang cukup serta melalui proses pengolahan yang tepat, mampu menghasilkan tingkat akurasi yang tinggi dalam analisis sentimen. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menangkap ragam nuansa opini publik, sehingga mampu menghadirkan gambaran yang lebih tajam mengenai perasaan pengguna Instagram. Penggabungan fitur berbasis teks, serta potensi pemanfaatan fitur visual, turut memperkaya proses analisis sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih utuh terhadap pola keterlibatan dan respons pengguna.
5	(Prihanum & Fadillah, 2024)	Analisis Sentimen Tanggapan Publik di Media Sosial Instagram Terhadap Program CSR “Esg Existance (EXIST)” PT Telkom	Temuan penelitian mengungkapkan bahwa program EXIST menerima respons positif yang signifikan atas upaya Telkom dalam mempromosikan keberlanjutan lingkungan, inklusi sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik.

			Namun demikian, program ini juga menghadapi tantangan dalam hal transparansi dan persepsi efektivitas pelaksanaannya. F
--	--	--	---

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berangkat dari unggahan akun Instagram yang membahas putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden sebagai stimulus utama. Unggahan tersebut memunculkan beragam tanggapan dalam kolom komentar, yang kemudian membentuk spektrum opini publik. Ragam respons tersebut selanjutnya dipetakan ke dalam tiga kategori resepsi, yakni posisi dominan, posisi negosiasi, dan posisi oposisi.

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



E. Hipotesis

Dalam penelitian ini, peneliti merumuskan hipotesis bahwa kecenderungan frekuensi komentar pada unggahan tersebut di akun @kumparancom lebih banyak berada pada kategori oposisi. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa sebagian besar komentar berisi ungkapan keberatan, kritik, serta keluhan netizen terhadap kebijakan yang dipublikasikan dalam unggahan tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis isi (content analysis). Metode tersebut dipilih karena dianggap tepat untuk menelaah serta mengukur karakteristik pesan yang termanifestasi dalam komentar-komentar pada akun Instagram @kumparancom terkait putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Pendekatan kuantitatif digunakan karena berorientasi pada upaya menjelaskan suatu permasalahan yang hasilnya dapat digeneralisasikan, tanpa terlalu menitikberatkan pada kedalaman data (Kriyantono, 2019: 55). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi kuantitatif, yakni teknik penelitian yang bertujuan menelaah komunikasi secara sistematis, objektif, dan terukur terhadap pesan yang diteliti. Sifat sistematis mengharuskan peneliti menentukan secara jelas isi komunikasi yang dianalisis, sifat objektif menuntut peneliti untuk menghindari subjektivitas dalam proses penilaian, sedangkan sifat kuantitatif menuntut pemberian skor pada setiap kategori yang kemudian dihitung frekuensinya (Kriyantono, 2020: 157).

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2018), populasi merupakan wilayah generalisasi yang mencakup objek atau subjek dengan karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari, kemudian dijadikan dasar penarikan

kesimpulan. Dalam konteks penelitian ini, populasi yang dimaksud adalah seluruh komentar pada unggahan akun Instagram @kumparancom yang membahas putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, yang dipublikasikan pada tanggal 16 Oktober 2023, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 2.188 komentar.

2. Sampel dan Teknik Sampling

Sampel merupakan sebagian dari elemen populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan karakteristik yang ada. Penentuan jumlah sampel umumnya dilakukan melalui perhitungan statistik atau estimasi penelitian, dengan tujuan memperoleh ukuran sampel yang memadai untuk mengkaji objek penelitian secara representatif. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Simple Random Sampling. Teknik ini merupakan metode pemilihan sampel di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih, tanpa mempertimbangkan perbedaan karakteristik tertentu. Melalui teknik ini, diharapkan sampel yang diperoleh mampu merepresentasikan populasi secara menyeluruh, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan.

Pengambilan sampel untuk penelitian ini dengan kriteria:

- a. Komentar tidak hanya berupa hastag
- b. Komentar tidak hanya berupa emoticon
- c. Komentar tidak hanya berupa promosi pada *online shop*
- d. Komentar harus berisikan kalimat yang berkaitan dengan putusan mahkamah konstitusi tentang batas usia Capres-Cawapres.

- e. Komentar bukan berupa komentar balasan dari komentar lainnya.

Langkah-langkah dalam pengambilan sample untuk penelitian ini :

- a. Membuka unggahan instgram @kumparancom . (menggunakan aplikasi browser dilaptop) yang menjadi bahan utama untuk penelitian ini.
- b. Menyalin seluruh komentar pada unggahan tersebut secara manual dengan meng-blok seluruh komentar lalu menekan tombol ctrl + C pada keyboard.
- c. Kemudian seluruh komentar tersebut disalin kedalam aplikasi Notepad++ dengan menekan tombol ctrl + V.
- d. Hasilnya berjumlah 1470 dari 2188 komentar pada unggahan instgram tersebut. Karena komentar yang disalin adalah komentar pertama dan bukan dari balasan komentar sebelumnya maka didapat 1470 komentar.
- e. Dengan menggunakan kriteria yang telah dijelaskan diatas, 1470 komentar ini menjadi 553 komentar yang memenuhi kriteria tersebut. Maka 553 inilah populasi untuk penelitian ini. Proses cleanig 1470 menjadi 553 komentar dibantu tools Google Collab.

Kriteria sampel diatas digunakan untuk menentukan sampel yang dapat digunakan yakni 553 populasi yang memenuhi kriteria diatas. Jumlah sampel didapatkan menggunakan metode rumus Slovin dengan margin error 0,05 atau 5%.

Untuk lebih jelasnya ditentukan dengan menggunakan rumus: (Umar, 2010: 69)

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Nilai Error

Maka,

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{553}{1 + 410(0,05)^2}$$

$$n = \frac{553}{1 + 410 \cdot 0,0025}$$

$$n = \frac{553}{1 + 1,3825}$$

$$n = \frac{410}{2,3825} = 232,3$$

maka n (sampel) = 232

Untuk pengambilan sample menggunakan teknik random sampling dan dibantu dengan tools berupa website random.org. Disini peneliti hanya mengambil 232 komentar pertama dari seluruh populasi yang telah dirandomize menggunakan website tersebut.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menganalisis komentar di platform Instagram, khususnya pada akun @kumparancom. Waktu penelitian dilakukan selama 4 bulan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

NO	KENIS KEGIATAN	BULAN DAN MINGGU KE																KET
		APRIL				MEI				JUNI				JULI				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Persiapan Dan Penyusunan UP	X	X															
2	Seminar UP			X														
3	Riset				X	X												
4	Penelitian Lapangan						X	X										
5	Pengolahan dan Analisis Data									X	X							
6	Konsultasi Bimbingan Skripsi											X	X	X				
7	Ujian Skripsi													X				
8	Revisi Dan Pengesahan Skripsi														X	X		
9	Penggandaan Serta Penyerahan Skripsi																	X

D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer dapat dipahami sebagai himpunan informasi yang dipetik langsung oleh peneliti dari sumber asalnya, tanpa melalui tangan kedua atau perantara lain. Data ini biasanya diperoleh melalui interaksi langsung dengan objek penelitian, seperti wawancara, pengamatan, atau bentuk pengumpulan data lapangan lainnya (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini, sumber data primer bersumber dari percakapan digital yang berjejak pada kolom komentar unggahan Instagram @kumparancom. Data tersebut

meliputi butir-butir komentar netizen, hasil proses pengodean serta pengelompokan tanggapan, hingga potret karakter respons publik yang tercermin dari dinamika opini yang muncul di ruang komentar tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber informasi yang tidak diperoleh peneliti secara langsung dari objek penelitian, melainkan melalui perantara atau hasil pencatatan pihak lain yang telah lebih dahulu mengumpulkannya. Data jenis ini berfungsi sebagai pelengkap dan penguat data primer, karena umumnya telah tersusun dalam bentuk dokumen, arsip, laporan historis, atau catatan penelitian sebelumnya. Dalam konteks penelitian ini, data sekunder bersumber dari berbagai bahan rujukan seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, skripsi, serta literatur lain yang relevan dengan topik penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan Sehubungan dengan masalah penelitian maka peneliti membuat teknik pengumpulan data dengan :

1. Observasi

Observasi merupakan instrumen penelitian yang digunakan untuk menelaah perilaku individu maupun jalannya suatu aktivitas, baik dalam situasi yang berlangsung secara alami maupun dalam kondisi yang sengaja dirancang untuk kepentingan pengamatan (Nasution, 2021: 11). Melalui teknik ini, peneliti berupaya menangkap fenomena yang terjadi secara langsung. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan menelusuri dan

mencermati seluruh komentar yang terdapat pada unggahan akun Instagram @kumparancom.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai dokumen, baik yang disusun oleh subjek penelitian maupun oleh pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan objek kajian. Melalui teknik ini, peneliti berupaya menghimpun bukti-bukti tertulis yang dapat memperkaya serta menyempurnakan data penelitian. Dalam penelitian ini, proses dokumentasi dilakukan melalui teknik coding, yaitu pemberian kategori pada setiap komentar berdasarkan klasifikasi resepsi Stuart Hall, yakni posisi dominan, negosiasi, dan oposisi. Kategorisasi tersebut digunakan untuk menghitung frekuensi kemunculan masing-masing posisi dalam komentar pada akun Instagram @kumparancom.

F. Analisis Data

Penelitian ini menerapkan analisis isi kuantitatif sebagai pendekatan utama untuk membedah pesan-pesan komunikasi yang tampak secara sistematis dan terukur. Melalui pendekatan ini, pesan dianalisis secara objektif dengan menitikberatkan pada aspek yang dapat dihitung dan diklasifikasikan. Peneliti melakukan proses coding terhadap komentar publik pada akun Instagram @kumparancom yang menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Proses pengodean tersebut mengacu pada kategori resepsi yang dikemukakan oleh Stuart Hall. Seluruh

hasil pengodean dicatat dalam lembar kerja coding untuk mengetahui jumlah masing-masing kategori, yang selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel frekuensi guna memperoleh persentase setiap kategori.

Analisis dilakukan dengan menggunakan teori analisis resepsi (Reception Analysis) Stuart Hall, yang membagi proses pemaknaan pesan ke dalam tiga posisi decoding. Pertama, Dominant-Hegemonic Position, yaitu kondisi ketika khalayak menerima pesan sebagaimana dimaksudkan oleh media tanpa banyak pertanyaan. Pada posisi ini, makna pesan diterima secara utuh dan dianggap wajar karena selaras dengan nilai atau ideologi yang dominan. Kedua, Negotiated Position, yakni situasi ketika khalayak pada dasarnya menerima pesan yang disampaikan, namun melakukan penyesuaian tertentu berdasarkan pengalaman, kepentingan, atau kondisi pribadi mereka. Ketiga, Oppositional Position, yaitu ketika khalayak memahami pesan yang disampaikan media, baik secara literal maupun konotatif, tetapi justru menafsirkannya secara berlawanan. Posisi ini muncul dari sudut pandang kritis khalayak yang menolak makna dominan dan membangun pemaknaan alternatif sesuai dengan pandangan mereka sendiri.

Dari total 232 sampel komentar yang dianalisis dan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori tersebut, peneliti selanjutnya menelaah isi dari masing-masing kategori. Analisis ini diarahkan untuk mengidentifikasi topik atau isu yang paling menonjol dalam setiap posisi resepsi, sehingga dapat diketahui kecenderungan sentimen publik yang mendasari respons masyarakat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.

BAB IV

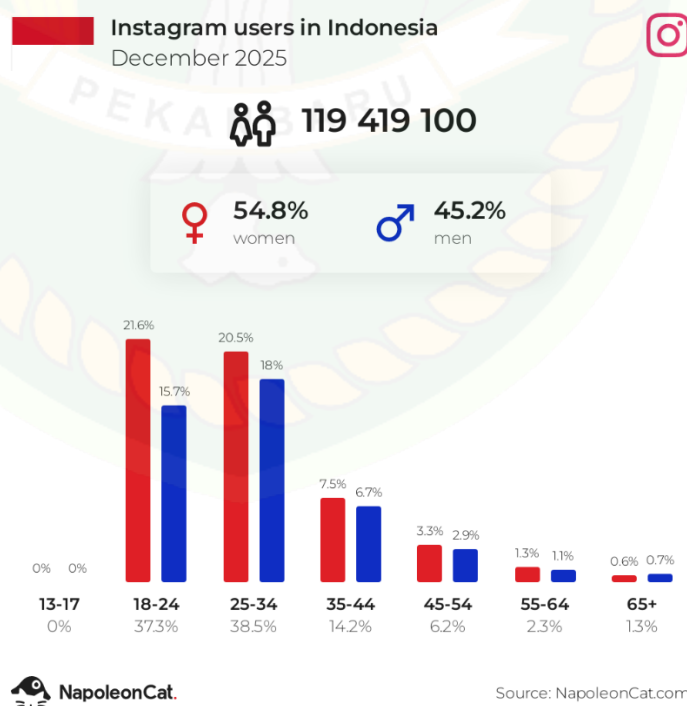
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Instagram sebagai Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada platform media sosial Instagram, yang merupakan salah satu media sosial paling populer di Indonesia. Instagram adalah aplikasi berbagi foto dan video yang diluncurkan pada tahun 2010 oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger. Platform ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah foto dan video, memberikan komentar, menyukai konten, serta berinteraksi dengan pengguna lain melalui fitur-fitur seperti *Direct Message* (DM), *Stories*, dan *Reels*.

Gambar 4.1 Data pengguna Instagram



Berdasarkan data Napoleon Cat per desember 2025, Indonesia memiliki 119,419,100 juta pengguna Instagram atau setara dengan 41,8% dari seluruh populasi Indonesia. Hal ini menempatkan Indonesia di peringkat keempat secara global dalam jumlah pengguna Instagram. Demografi pengguna Instagram di Indonesia didominasi oleh kelompok usia 25-34 tahun dengan jumlah 46.000.000 pengguna, diikuti oleh kelompok usia 18-24 tahun. Proporsi pengguna perempuan mencapai 54,8% sementara laki-laki 45,2%. Karakteristik demografis ini menunjukkan bahwa Instagram merupakan platform yang efektif untuk mengamati respons publik terhadap isu-isu politik dan kebijakan pemerintah, khususnya dari kalangan generasi muda yang aktif dalam diskursus politik digital. Instagram sebagai ruang publik digital memiliki beberapa karakteristik penting:

- a. Interaktivitas Tinggi : Pengguna dapat dengan mudah memberikan respons melalui fitur komentar, *like*, dan *share* terhadap konten yang diunggah.
- b. Aksesibilitas : Platform ini dapat diakses kapan saja dan dari mana saja menggunakan perangkat *mobile*, memungkinkan partisipasi publik yang lebih luas.
- c. Transparansi Komunikasi : Komentar dan interaksi bersifat publik dan dapat dilihat oleh pengguna lain, menciptakan ruang diskusi terbuka.

- d. Kecepatan Penyebaran Informasi : Informasi dapat menyebar dengan cepat melalui fitur berbagi dan algoritma platform yang menampilkan konten populer.

2. Profil Akun Instagram @kumparancom

Lokasi spesifik penelitian ini adalah akun Instagram @kumparancom, yang merupakan akun resmi media daring Kumparan. Kumparan adalah platform media digital Indonesia yang didirikan pada tahun 2017 oleh mantan CEO Yahoo! Indonesia, Hugo Diba. Platform ini menyajikan berbagai konten berita mulai dari politik, ekonomi, teknologi, gaya hidup, hingga olahraga. Karakteristik akun @kumparancom:

- a. Jumlah Pengikut : Akun ini memiliki basis pengikut yang signifikan, menjadikannya salah satu akun media berita terkemuka di Instagram Indonesia.
- b. Frekuensi Posting : @kumparancom secara aktif mengunggah konten berita dan informasi terkini, termasuk isu-isu politik strategis nasional.
- c. *Engagement Rate* : Unggahan akun ini mendapatkan respons yang tinggi dari followers, terlihat dari jumlah like, komentar, dan share pada setiap postingannya.
- d. Kredibilitas : Sebagai media daring yang telah terverifikasi, @kumparancom dipandang sebagai sumber informasi yang kredibel oleh sebagian besar pengikutnya.

- e. Ragam Konten : Selain teks, akun ini menggunakan visual menarik berupa foto, infografis, dan video pendek untuk menyampaikan informasi.

3. Objek Penelitian Spesifik

Objek penelitian yang diteliti adalah unggahan akun @kumparancom pada tanggal 16 Oktober 2023 yang membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Unggahan ini dipilih karena beberapa alasan:

- a. *Timing* : Unggahan dipublikasikan pada hari yang sama dengan pengumuman putusan MK, sehingga dapat menangkap respons publik yang spontan dan *immediate*.
- b. Relevansi Isu : Putusan MK tentang batas usia capres-cawapres merupakan isu politik strategis yang berkaitan langsung dengan Pemilu 2024, sehingga mendapat perhatian luas dari masyarakat.
- c. Volume Interaksi : Unggahan ini mendapatkan respons yang sangat tinggi dengan total 2.188 komentar, menunjukkan tingginya antusiasme dan ketertarikan publik terhadap isu ini.
- d. Representativitas : Komentar-komentar pada unggahan ini mewakili beragam perspektif masyarakat Indonesia terhadap keputusan MK, mulai dari yang mendukung, menolak, hingga yang bersikap netral.

4. Periode Pengambilan Data

Pengambilan data penelitian dilakukan terhadap komentar pada unggahan akun @kumparancom tanggal 16 Oktober 2023 tentang putusan Mahkamah Konstitusi. Perlu dicatat bahwa pengambilan data tidak dilakukan pada hari yang sama dengan publikasi unggahan tersebut, melainkan dilakukan beberapa waktu setelahnya. Pada saat pengambilan data, total komentar yang terekam pada unggahan tersebut berjumlah 2.188 komentar.

Karakteristik periode pengambilan data :

- a. Akumulasi Respons : Data yang diambil merupakan akumulasi respons publik yang telah terkumpul sejak unggahan dipublikasikan hingga waktu pengambilan data, sehingga mencerminkan respons publik yang lebih komprehensif dan tidak hanya reaksi *immediate*.
- b. Variasi Temporal Respons : Komentar-komentar yang terekam mencakup respons yang bervariasi secara temporal, mulai dari respons spontan yang muncul segera setelah unggahan dipublikasikan hingga respons yang lebih reflektif yang muncul beberapa waktu kemudian setelah diskusi berkembang.
- c. Representasi yang Lebih Luas : Dengan periode pengambilan yang tidak terbatas pada hari pertama publikasi, data mencakup respons dari berbagai kalangan yang mungkin mengakses informasi pada waktu yang berbeda-beda, memberikan gambaran yang lebih representatif tentang opini publik.

- d. Stabilitas Data : Jumlah komentar yang mencapai 2.188 menunjukkan bahwa diskusi telah mencapai tingkat saturasi tertentu, di mana berbagai perspektif dan argumen telah terekspresikan secara cukup komprehensif dalam kolom komentar.

5. Karakteristik Kolom Komentar sebagai Ruang Publik Digital

Kolom komentar Instagram @kumparancom berfungsi sebagai ruang publik digital (*digital public sphere*) dengan karakteristik khusus:

- a. Demokratisasi Suara : Setiap pengguna memiliki kesempatan yang sama untuk menyuarakan pendapatnya tanpa dibatasi oleh hierarki sosial atau ekonomi.
- b. Anonimitas Relatif : Meskipun menggunakan akun Instagram, banyak pengguna yang merasa memiliki kebebasan lebih besar dalam mengekspresikan pendapat dibandingkan komunikasi tatap muka.
- c. Dialogis : Komentar tidak hanya bersifat satu arah kepada pemilik akun, tetapi juga memungkinkan terjadinya dialog antar pengguna melalui fitur *reply*.
- d. Rekam Jejak Digital : Semua komentar terekam dan dapat dianalisis, memberikan data empiris tentang opini publik pada momen tertentu.
- e. Pengaruh Algoritma : Visibilitas komentar dipengaruhi oleh algoritma Instagram yang menampilkan komentar dengan *engagement* tinggi di posisi teratas.

Dengan memahami karakteristik lokasi penelitian ini, analisis terhadap respons publik dapat dilakukan dengan mempertimbangkan konteks platform media sosial sebagai ruang publik digital yang memiliki dinamika komunikasi yang khas.

B. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini menganalisis komentar pada unggahan akun Instagram @kumparancom tanggal 16 Oktober 2023 tentang putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Proses pengumpulan dan pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

e. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi awal penelitian ini adalah seluruh komentar yang terdapat pada unggahan @kumparancom tanggal 16 Oktober 2023, yang berjumlah 2.188 komentar. Dari jumlah tersebut, dilakukan proses seleksi dengan kriteria tertentu untuk mendapatkan komentar yang relevan dan dapat dianalisis.

1) Tahap 1 : Seleksi Komentar Pertama

Dari 2.188 komentar total, peneliti melakukan seleksi untuk mengambil hanya komentar utama (bukan balasan dari komentar lain), menghasilkan 1.470 komentar.

2) Tahap 2 : Proses *Cleaning Data*

Dari 1.470 komentar dilakukan pembersihan data (*data cleaning*) dengan menghapus komentar yang:

- a) Hanya berisi hashtag
- b) Hanya berisi emoticon
- c) Hanya berisi promosi online shop
- d) Tidak berkaitan dengan putusan MK tentang batas usia capres-cawapres
- e) Komentar spam atau tidak substansial

Proses *cleaning* ini menggunakan bantuan tools Google Colab dan menghasilkan 553 komentar yang memenuhi kriteria penelitian. Jumlah 553 komentar inilah yang menjadi populasi penelitian.

3) Tahap 3 : Penentuan Sampel

Dari populasi 553 komentar, dilakukan penentuan sampel menggunakan rumus Slovin dengan margin error 5% (0,05):

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{553}{1 + 410(0,05)^2}$$

$$n = \frac{553}{1 + 410 \cdot 0,0025}$$

$$n = \frac{553}{1 + 1,3825}$$

$$n = \frac{410}{2,3825} = 232,3$$

Pengambilan 232 sampel dilakukan secara acak menggunakan teknik *Simple Random Sampling* dengan bantuan website random.org untuk memastikan setiap komentar memiliki peluang yang sama untuk terpilih.

f. Karakteristik Data Komentar

Komentar-komentar yang menjadi sampel penelitian memiliki karakteristik beragam, meliputi:

- 1) Variasi Panjang Komentar : Mulai dari komentar singkat (5 kata) hingga komentar panjang yang berisi argumentasi lengkap (lebih dari 20 kata).
- 2) Beragam Gaya Bahasa : Terdapat komentar formal menggunakan bahasa baku, komentar informal menggunakan bahasa sehari-hari, serta komentar yang menggunakan bahasa daerah atau campuran.
- 3) Penggunaan Simbol dan Tanda Baca : Banyak komentar menggunakan tanda seru (!), tanda tanya (?), huruf kapital untuk penekanan, serta emoji untuk mengekspresikan emosi.
- 4) Konten Substantif : Komentar-komentar yang lolos seleksi mengandung opini, argumen, kritik, dukungan, atau pertanyaan terkait putusan MK tentang batas usia capres-cawapres.

2. Kategorisasi Komentar Berdasarkan Teori Resepsi Stuart Hall

Berdasarkan Teori Resepsi Stuart Hall, peneliti melakukan kategorisasi terhadap 232 komentar sampel ke dalam tiga kategori pemaknaan : *Dominant-Hegemonic Position*, *Negotiated Position*, dan *Oppositional Position*. Proses kategorisasi dilakukan melalui analisis isi (*content analysis*) dengan mengidentifikasi posisi pemaknaan responden terhadap putusan MK.

a. Kategori *Dominant-Hegemonic Position* (Dominan/Pro)

Kategori *Dominant-Hegemonic Position* adalah komentar-komentar yang menunjukkan penerimaan penuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan batas usia capres-cawapres. Responden dalam kategori ini memaknai pesan sesuai dengan maksud yang disampaikan oleh pembuat kebijakan dan media.

1) Karakteristik Komentar Dominan :

- a) Menyatakan dukungan terhadap keputusan MK
- b) Menganggap putusan sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhan
- c) Memberikan argumentasi yang sejalan dengan pertimbangan hukum MK
- d) Tidak mempertanyakan atau mengkritik substansi putusan

Jumlah: Dari 232 sampel, terdapat 22 komentar (9,48%) yang masuk kategori *Dominant-Hegemonic Position*

2) Contoh Komentar Kategori Dominan :

- a) iqbuaaal_ : “finallyyy, generasi muda punya kesempatan lebih besar untuk ikut memimpin! keputusan MK ini membuka pintu bagi pemimpin-pemimpin muda yang punya ide segar dan semangat perubahan. ita butuh pemimpin yang nggak hanya berpengalaman, tapi juga paham situasi kekinian dan dekat dengan aspirasi anak muda. sebagai anak muda menurut saya ini adalah langkah maju buat Indonesia!”
- b) afrena_tn : “kalo gue sih setuju banget dengan putusan MK soal batas usia capres-cawapres! pengalaman jadi kepala daerah menurutku bikin calon pemimpin lebih siap dan paham betul seluk-beluk pemerintahan. jadi, nggak cuma ide segar, tapi juga kebijaksanaan dalam bertindak. ini langkah yang tepat untuk memastikan pemimpin yang dipilih udah punya pengalaman nyata dan bisa bawa perubahan yang lebih baik. 🤝”
- c) bang_juna84 : “Alhamdulillah, akhirnya ada kesempatan bagi generasi muda untuk berkontribusi langsung dalam kepemimpinan nasional. Ini adalah langkah progresif”
- d) irwanraditya65 : “Intinya,usia blm memenuhi syarat,tp pengalaman sbg kepala daerah adh memenuhi syarat utk ikut pilpres...”
- e) rezkysukiman : “Gapapa sih pasangin prabowo - gibran aja. Hehehe”

3) Analisis Kategori Dominant:

Responden dalam kategori ini cenderung memandang putusan MK secara positif sebagai langkah progresif menuju demokratisasi dan regenerasi kepemimpinan. Mereka menekankan aspek kompetensi dan kapabilitas yang tidak selalu berkorelasi dengan usia.

Argumentasi yang muncul umumnya berkaitan dengan:

- a) Pentingnya regenerasi kepemimpinan
- b) Kebutuhan akan pemimpin yang memahami era digital
- c) Perbandingan dengan negara-negara lain yang memiliki pemimpin muda
- d) Fokus pada kompetensi daripada usia

b. Kategori *Negotiated Position* (Negosiasi/Netral)

Kategori *Negotiated Position* adalah komentar-komentar yang menunjukkan penerimaan terhadap putusan MK namun dengan pengecualian atau pertimbangan tertentu. Responden dalam kategori ini memahami dan menerima keputusan secara umum, tetapi mengajukan syarat, kritik konstruktif, atau kekhawatiran tertentu.

1) Karakteristik Komentar Negosiasi :

- a) Menerima putusan tetapi dengan catatan tertentu
- b) Mengajukan syarat atau kondisi tambahan
- c) Melihat ada sisi positif dan negatif dari putusan
- d) Memberikan kritik konstruktif sambil tetap menerima keputusan

Jumlah : Dari 232 sampel, terdapat 104 komentar (44,83 %) yang masuk kategori *Negotiated Position*.

2) Contoh Komentar Kategori Negosiasi :

- a) Sahabatcpns : “siapa disini yang setuju dengan keputusan MK?”
- b) ba2r_md : “Apa dasar nya boleh Krn sudah pernah jadi kepala daerah ya ? Masih bingung indikatornya 🤔”
- c) stellaflo : “Kepala desa termasuk Kepala daerah ga ya? 😊”
- d) hombingoyoy : “sejauh ini putusan nya nya sah" saja ku rasa, cuma kalo memang ada sosok yg menurut netizen tiba" jd cawapres, baru patut di duga putusan nya sudah di atur 😊😊”
- e) streetjustice.idn : “Syarat punya pengalaman jadi kepala daerah tolok ukurnya apa? Apakah daerahnya tambah maju atau biasa2 saja??? Semakin menggila pejabat2 tengik Konoha ini”

3) Analisis Kategori Negotiated:

Responden dalam kategori ini menunjukkan sikap kritis namun konstruktif. Mereka tidak sepenuhnya menolak putusan MK, tetapi mengajukan berbagai pertimbangan tambahan. Kekhawatiran utama yang muncul meliputi:

- a) Perlunya standar kompetensi yang jelas
- b) Kekhawatiran akan politisasi putusan
- c) Timing putusan yang dianggap mencurigakan
- d) Pentingnya pengalaman dan track record
- e) Konsistensi MK dalam mengambil keputusan

f) Potensi penyalahgunaan untuk kepentingan politik tertentu

Kategori ini mencerminkan pemikiran kritis masyarakat yang tidak hanya menerima atau menolak mentah-mentah, tetapi berusaha memahami implikasi dari putusan dengan lebih komprehensif.

c. Kategori *Oppositional Position*

Kategori *Oppositional Position* adalah komentar-komentar yang menunjukkan penolakan atau oposisi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Responden dalam kategori ini memiliki pemaknaan yang bertolak belakang dengan maksud putusan dan cenderung mengkritik keras keputusan MK.

1) Karakteristik Komentar *Oppositional*:

- a) Menolak dan mengkritik putusan MK
- b) Menganggap putusan tidak objektif atau bermasalah
- c) Mencurigai adanya kepentingan politik di balik putusan
- d) Mengekspresikan kekecewaan atau kemarahan
- e) Memberikan argumentasi yang berlawanan dengan substansi putusan

Jumlah : Dari 232 sampel, terdapat 106 komentar (45,89%) yang masuk kategori *Oppositional Position*.

2) Contoh Komentar Kategori *Oppositional*:

- a) prizyia_11 : “Dari awal udah tau bakal kayak gini.. kan mahkamah keluargaaa @mahkamahkonstitusi”

b) dabs_digital : “Gw suka mas wali sih, tapi kalau cuma gara2 ada kepentingan partai terus merubah konstitusi sih sudah nggak bener ini, sekelas lembaga negara bisa disetir kewenangannya itu sudah sick”

c) haiozzan_552 : “Putusan @mahkamahkonstitusi ini memang 🤔👎🗨️ Dasar Dinasti Politik Busuk 🤔👎🗨️”

d) silarn29 : “Real bukan orangnya yg diubah, tp aturannya yg diubah 🤔”

e) a23666 : “Negara bukan punya keluarga”

3) Analisis Kategori Oppositional:

Kategori ini mendominasi respons publik dengan persentase 45,89%. Hal ini menunjukkan tingginya ketidakpuasan dan kritik publik terhadap putusan MK. Tema-tema utama yang muncul dalam kategori oposisi meliputi:

a) Tuduhan Politisasi Putusan : Sebagian besar komentar oposisi menganggap putusan MK dibuat untuk mengakomodasi kepentingan politik tertentu, khususnya terkait dengan calon tertentu yang sebelumnya tidak memenuhi syarat usia.

b) Kritik terhadap Timing : Banyak responden mempertanyakan waktu keluarnya putusan yang dianggap terlalu dekat dengan pemilu 2024, menimbulkan kecurigaan adanya agenda tersembunyi.

- c) Kekhawatiran Dinasti Politik : Responden mengaitkan putusan ini dengan upaya membangun dinasti politik, khususnya mengingat konteks politik Indonesia menjelang pemilu.
- d) Hilangnya Kepercayaan terhadap MK : Komentar-komentar mencerminkan erosi kepercayaan publik terhadap independensi dan objektivitas Mahkamah Konstitusi.
- e) Kritik terhadap Demokrasi : Banyak responden memandang putusan ini sebagai kemunduran demokrasi dan memperkuat oligarki politik.
- f) Ekspresi Emosional : Komentar dalam kategori ini cenderung lebih emosional, menggunakan kata-kata yang mengekspresikan kekecewaan, kemarahan, atau frustrasi.

3. Distribusi Frekuensi Kategorisasi

Berdasarkan hasil analisis terhadap 232 sampel komentar, berikut adalah distribusi frekuensi dan persentase untuk setiap kategori:

Tabel 4.1 Distribusi Kategorisasi Komentar Berdasarkan Teori Resepsi Stuart Hall

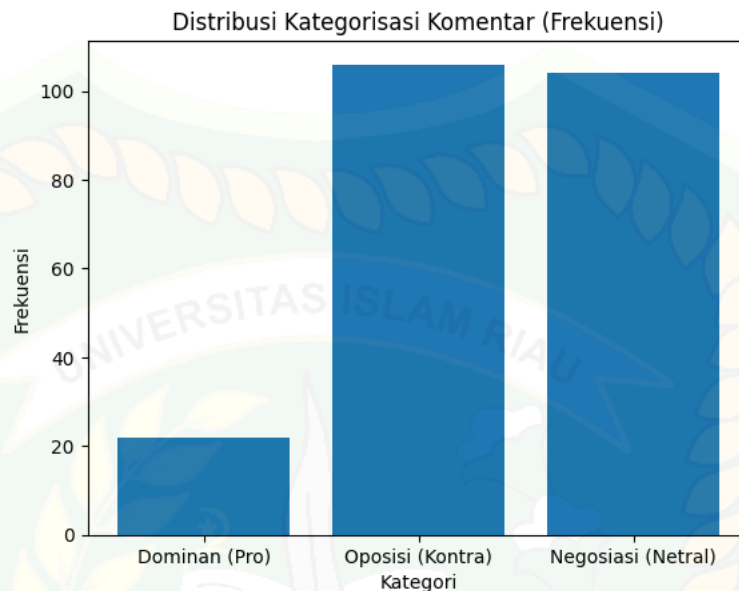
Tabel 4.1

Distribusi kategorisasi komentar

No.	Kategori	frekuensi	Persentase
1.	Dominan (Pro)	22	9,48%
2.	Oposisi (Kontra)	106	45,89%
3.	Negosiasi (Netral)	104	44,83%
Total		232	100%

Gambar 4.2

Grafik Frekuensi Komentar Berdasarkan Kategorisasi



4. Interpretasi Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kategori *Oppositional Position* mendominasi respons publik dengan 106 komentar (45,89%), diikuti oleh *Negotiated Position* dengan 104 komentar (44,83%), dan *Dominant-Hegemonic Position* dengan 22 komentar (9,48%).

a. Validasi Hipotesis

Hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa "frekuensi paling banyak pada komentar unggahan tersebut di akun @kumparancom berada pada kategori oposisi" TERBUKTI. Data menunjukkan bahwa kategori *Oppositional Position* mencapai 45,89%, yang mana merupakan kategori dengan frekuensi yang paling banyak dari total sampel penelitian. Hal ini mengindikasikan bahwa:

- 1) Publik lebih banyak menolak atau mengkritik putusan MK dibandingkan menerimanya
- 2) Terdapat ketidakpuasan yang signifikan terhadap keputusan perubahan batas usia capres-cawapres
- 3) Kepercayaan publik terhadap objektivitas MK mengalami penurunan
- 4) Isu politisasi keputusan menjadi concern utama masyarakat

b. Pola Respons Publik

Distribusi kategorisasi menunjukkan pola respons publik yang menarik:

- 1) Polarisasi Opini : Terdapat polarisasi yang cukup jelas antara kelompok yang mendukung (9,48%) dan yang menolak (45,89%) putusan MK. Kelompok yang berada di posisi tengah (negosiasi) mencapai 44,83%, menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih bersikap kritis-konstruktif.
- 2) Dominasi Kritik : Lebih dari separuh responden berada dalam posisi oposisi, mencerminkan skeptisisme publik yang tinggi terhadap motif di balik putusan. Hal ini dapat dikaitkan dengan konteks politik Indonesia menjelang pemilu 2024 dan isu-isu yang berkembang di media sosial terkait dugaan politisasi keputusan.
- 3) Keterlibatan Publik yang Tinggi : Jumlah komentar yang mencapai 2.188 (sebelum filtering) menunjukkan bahwa isu ini mendapat perhatian besar dari publik. Masyarakat merasa perlu untuk menyuarakan pendapat mereka, baik pro maupun kontra.

c. Tema-tema Dominan

Dari analisis konten komentar, teridentifikasi beberapa tema dominan:

1) Tema dalam Kategori Oppositional (Dominan) :

- a) Politisasi putusan MK
- b) Dinasti politik
- c) Hilangnya independensi MK
- d) Timing yang mencurigakan
- e) Ketidakadilan dan ketidakpercayaan terhadap sistem

2) Tema dalam Kategori Negotiated :

- a) Pentingnya standar kompetensi
- b) Kekhawatiran akan penyalahgunaan
- c) Kritik konstruktif terhadap timing
- d) Harapan akan implementasi yang adil

3) Tema dalam Kategori Dominant :

- a) Regenerasi kepemimpinan
- b) Fokus pada kompetensi vs usia
- c) Perbandingan dengan negara lain
- d) Optimisme terhadap pemimpin muda

5. Temuan Tambahan

Selain kategorisasi utama, penelitian ini menemukan beberapa aspek menarik:

a. Penggunaan Bahasa dan Retorika

- 1) Kategori Oposisi : Menggunakan bahasa yang lebih emosional, tegas, dan kadang mengandung sarkasme. Banyak penggunaan tanda seru, huruf kapital, dan kata-kata yang mengekspresikan kemarahan atau kekecewaan.
- 2) Kategori Negosiasi : Menggunakan bahasa yang lebih berimbang, dengan kata-kata penghubung seperti "tapi", "namun", "seharusnya", yang menunjukkan pertimbangan ganda.
- 3) Kategori Dominant : Menggunakan bahasa yang lebih optimis dan positif, dengan kata-kata seperti "mendukung", "setuju", "bagus", "tepat".

b. Referensi Kontekstual

Banyak komentar yang merujuk pada :

- 1) Konteks politik menjelang pemilu 2024
- 2) Figur-figur politik tertentu (meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam beberapa komentar)
- 3) Perbandingan dengan putusan MK sebelumnya
- 4) Kondisi demokrasi Indonesia secara umum

c. Keterlibatan Emosional

Tingkat keterlibatan emosional paling tinggi terlihat pada kategori Oppositional, di mana responden tidak hanya menyampaikan ketidaksetujuan tetapi juga mengekspresikan perasaan kecewa, marah, atau frustrasi terhadap kondisi politik Indonesia.

Temuan ini menunjukkan bahwa putusan MK tentang batas usia capres-cawapres bukan hanya dipandang sebagai isu hukum atau teknis, tetapi telah menjadi isu politik yang menyentuh aspek emosional masyarakat dan berkaitan dengan kepercayaan terhadap institusi demokrasi di Indonesia.

C. Pembahasan Penelitian

1. Analisis Dominasi Kategori *Oppositional Position*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kategori *Oppositional Position* mendominasi dengan persentase 45,89% (106 komentar dari 232 sampel). Temuan ini sejalan dengan hipotesis penelitian dan mengindikasikan adanya resistensi publik yang signifikan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan batas usia capres-cawapres.

a. Konteks Politik dan Timing Putusan

Dominasi kategori oposisi tidak dapat dilepaskan dari konteks politik Indonesia menjelang Pemilu 2024. Putusan MK yang dikeluarkan pada 16 Oktober 2023, kurang dari satu tahun sebelum pelaksanaan pemilu, menimbulkan kecurigaan publik terhadap motif di balik keputusan tersebut. Hal ini sejalan dengan temuan Paradita & Triadi (2024) yang menyatakan bahwa timing putusan MK menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi publik terhadap objektivitas lembaga tersebut.

Dalam konteks teori ruang publik (*public sphere*) Habermas (1989), media sosial Instagram telah berfungsi sebagai arena diskursus

publik di mana masyarakat dapat secara bebas mengekspresikan ketidaksetujuan mereka terhadap kebijakan yang dianggap bermasalah. Kebebasan berekspresi di ruang digital ini memungkinkan munculnya kritik yang lebih terbuka dan berani dibandingkan dengan ruang publik konvensional.

b. Isu Politisasi dan Independensi MK

Tema dominan dalam kategori oposisi adalah tuduhan politisasi putusan MK. Sebagian besar responden dalam kategori ini mencurigai bahwa putusan dibuat untuk mengakomodasi kepentingan politik tertentu, khususnya terkait dengan figur-figur politik yang sebelumnya tidak memenuhi syarat usia minimal 40 tahun.

Kekhawatiran terhadap politisasi lembaga peradilan bukanlah fenomena baru dalam diskursus politik Indonesia. Penelitian Pangidoan et al. (2024) menunjukkan bahwa pemberitaan media tentang putusan MK ini memang mempengaruhi citra Mahkamah Konstitusi di mata publik. Ketika publik mempersepsikan bahwa lembaga yang seharusnya independen terpengaruh oleh kepentingan politik, kepercayaan terhadap sistem demokrasi secara keseluruhan dapat terkikis.

c. Sentimen Anti-Dinasti Politik

Banyak komentar dalam kategori oposisi men+gaitkan putusan ini dengan upaya pembentukan dinasti politik. Isu dinasti politik telah

menjadi concern publik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan munculnya fenomena anggota keluarga petahana yang mencalonkan diri dalam berbagai posisi politik.

Sugitanata (2023) mencatat bahwa perdebatan mengenai batas usia capres-cawapres tidak hanya menyangkut aspek legal-formal, tetapi juga berkaitan dengan persepsi publik tentang fairness dalam kompetisi politik. Ketika putusan dianggap menguntungkan pihak tertentu, terutama yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan penguasa, maka muncul persepsi bahwa sistem politik tidak lagi berdasarkan meritokrasi tetapi nepotisme.

1. Ekspresi Emosional dan Bahasa Protes

Analisis terhadap bahasa yang digunakan dalam komentar kategori oposisi menunjukkan tingkat keterlibatan emosional yang tinggi. Penggunaan kata-kata seperti "menyedihkan", "kecewa berat", "naudzubillah", serta penggunaan huruf kapital dan tanda seru berulang kali, mencerminkan frustrasi dan kemarahan publik.

Menurut penelitian Rozi & Firman (2018) tentang reaksi masyarakat terhadap isu politik kontroversial, media sosial memberikan ruang bagi ekspresi emosional yang lebih bebas dibandingkan dengan komunikasi formal. Anonimitas relatif dan jarak fisik dalam komunikasi digital memungkinkan pengguna untuk mengekspresikan perasaan dengan lebih intens tanpa takut akan konsekuensi sosial langsung.

2. Analisis Kategori Negosiasi sebagai Posisi Tengah

Kategori negosiasi yang mencapai 44,83% (104 komentar) menunjukkan adanya kelompok masyarakat yang bersikap lebih kritis dan konstruktif. Kelompok ini tidak sepenuhnya menolak maupun menerima putusan MK, melainkan mengajukan pertimbangan-pertimbangan tambahan.

a. Karakteristik Pemikiran Kritis

Responden dalam kategori ini menunjukkan kemampuan berpikir kritis dengan mempertimbangkan berbagai aspek dari putusan MK. Mereka mampu melihat potensi positif dari penurunan batas usia (seperti regenerasi kepemimpinan dan kesempatan bagi pemimpin muda), namun juga mengidentifikasi risiko-risiko yang perlu dimitigasi.

Hal ini sejalan dengan konsep *negotiated code* dalam Teori Resepsi Stuart Hall, di mana khalayak menerima ideologi dominan namun melakukan modifikasi berdasarkan konteks dan pengalaman personal mereka. Dalam konteks penelitian ini, responden menerima konsep regenerasi kepemimpinan namun menambahkan syarat-syarat tertentu seperti standar kompetensi, pengalaman, dan track record yang jelas.

b. Kekhawatiran terhadap Implementasi

Tema utama dalam kategori *negotiated* adalah kekhawatiran terhadap implementasi putusan. Responden khawatir bahwa tanpa standar kompetensi yang jelas, penurunan batas usia dapat disalahgunakan oleh calon-calon yang tidak *qualified*. Ini mencerminkan pragmatisme dalam cara berpikir kelompok ini.

Penelitian Sugitanata (2023) menunjukkan bahwa salah satu argumen dalam persidangan MK adalah bahwa batas usia harus mempertimbangkan kematangan dan pengalaman calon pemimpin. Responden dalam kategori *negotiated* tampaknya mengadopsi argumen ini dan menuntut adanya mekanisme verifikasi kompetensi yang lebih ketat.

c. Sikap *Wait and See*

Beberapa komentar dalam kategori ini menunjukkan sikap "*wait and see*", di mana responden tidak langsung menghakimi putusan tetapi ingin melihat bagaimana implementasinya di lapangan. Sikap ini mencerminkan kepercayaan bersyarat (*conditional trust*) terhadap sistem politik dan hukum.

Sikap ini dapat dipahami sebagai bentuk partisipasi politik yang matang, di mana masyarakat tidak hanya reaktif tetapi juga memberikan kesempatan bagi sistem untuk membuktikan diri. Namun, kepercayaan ini bersifat *fragile* dan dapat berubah menjadi oposisi jika implementasi tidak sesuai dengan harapan.

3. Analisis Kategori Dominant-Hegemonic Position

Kategori *Dominant-Hegemonic Position* mencapai 9,48% (22 komentar), menjadikannya kategori dengan jumlah terendah. Hal ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil publik yang sepenuhnya menerima dan mendukung putusan MK tanpa reservasi.

a. Argumen Regenerasi Kepemimpinan

Responden dalam kategori ini menggunakan argumen regenerasi kepemimpinan sebagai justifikasi utama dukungan mereka. Mereka memandang bahwa penurunan batas usia membuka peluang bagi generasi muda untuk berkontribusi dalam kepemimpinan nasional.

Argumen ini sejalan dengan wacana yang dikembangkan oleh berbagai kalangan yang mendukung penurunan batas usia. Paradita & Triadi (2024) mencatat bahwa dalam persidangan MK, salah satu argumen pemohon adalah bahwa batasan usia 40 tahun tidak relevan dengan dinamika sosial dan politik saat ini serta menghambat partisipasi generasi muda.

b. Fokus pada Kompetensi vs Usia

Tema penting lainnya dalam kategori dominant adalah penekanan pada kompetensi daripada usia. Responden berpendapat bahwa kemampuan memimpin tidak selalu berkorelasi dengan usia, dan yang lebih penting adalah kapabilitas, integritas, dan visi calon pemimpin.

Perspektif ini mencerminkan pandangan progresif yang mengutamakan merit-based leadership. Dalam konteks global, banyak negara yang telah memiliki pemimpin muda yang terbukti kompeten, seperti Emmanuel Macron (Prancis), Sebastian Kurz (Austria), dan Sanna Marin (Finlandia). Responden dalam kategori ini tampaknya menggunakan benchmark internasional untuk mendukung argumen mereka.

c. Optimisme terhadap Perubahan

Komentar dalam kategori dominant menunjukkan optimisme terhadap perubahan dan harapan akan kepemimpinan yang lebih modern dan adaptif. Responden mengharapkan bahwa pemimpin muda akan lebih memahami dinamika era digital, teknologi, dan aspirasi generasi milenial dan Gen Z.

Namun, perlu dicatat bahwa optimisme ini muncul dalam konteks minoritas publik. Hanya sekitar seperlima responden yang menunjukkan optimisme ini, sementara mayoritas lebih skeptis atau bahkan menolak putusan.

4. Instagram sebagai Ruang Publik Digital dan Dinamika Komunikasi Politik

a. Demokratisasi Ruang Diskursus

Temuan penelitian ini mengkonfirmasi fungsi Instagram sebagai ruang publik digital yang demokratis. Sebagaimana dikemukakan

Arianto (2021), media sosial telah menjadi saluran aspirasi kewargaan yang memungkinkan individu untuk menyampaikan pandangan dan berinteraksi dengan orang lain secara luas.

Dalam kasus putusan MK ini, Instagram @kumparancom berfungsi sebagai arena di mana berbagai suara dari berbagai latar belakang dapat terdengar. Baik yang mendukung, menolak, maupun yang berada di posisi tengah, semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk menyuarakan pendapat mereka.

b. Karakteristik Komunikasi di Media Sosial

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa karakteristik komunikasi politik di Instagram:

a. **Spontanitas dan Reaktivitas**

Komentar-komentar yang muncul pada hari pengumuman putusan (16 Oktober 2023) menunjukkan sifat spontan dan reaktif dari komunikasi di media sosial. Berbeda dengan komunikasi politik konvensional yang cenderung lebih terstruktur dan formal, respons di media sosial lebih immediate dan emosional.

b. **Fragmentasi dan Polarisasi**

Data menunjukkan adanya polarisasi yang cukup jelas antara kelompok yang mendukung (9,48%) dan yang menolak (45,89%). Hal ini sejalan dengan temuan Sitorusa et al. (2024) tentang polarisasi politik melalui interaksi sosial di Instagram, di mana platform ini

dapat memperkuat echo chamber dan filter bubble yang mempertajam perbedaan opini.

c. **Partisipasi Masif**

Jumlah komentar yang mencapai 2.188 pada satu unggahan menunjukkan tingkat partisipasi publik yang sangat tinggi. Ini mengindikasikan bahwa isu-isu politik strategis mampu memobilisasi keterlibatan publik secara masif di ruang digital.

c. Peran Media dalam Membentuk Opini

Akun @kumparancom sebagai media berita memainkan peran penting dalam membentuk diskursus publik. Cara media membingkai (*framing*) berita tentang putusan MK dapat mempengaruhi bagaimana publik merespons informasi tersebut.

Penelitian ini menunjukkan bahwa bahkan ketika media hanya menyampaikan informasi faktual tentang putusan MK, respons publik sangat beragam dan dipengaruhi oleh konteks politik yang lebih luas. Ini menunjukkan bahwa pembaca tidak secara pasif menerima pesan media, tetapi secara aktif memaknai dan menginterpretasikan berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan orientasi politik mereka sendiri.

5. Implikasi terhadap Komunikasi Politik di Indonesia

a. Erosi Kepercayaan terhadap Institusi

Dominasi kategori oposisi dan banyaknya komentar yang mempertanyakan independensi MK menunjukkan adanya erosi kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Ini merupakan isu serius karena kepercayaan terhadap institusi adalah fondasi dari sistem demokrasi yang sehat.

Saepudin et al. (2018) menekankan pentingnya memahami respon publik terhadap putusan MK karena respon tersebut mencerminkan dinamika interaksi antara masyarakat dan lembaga negara. Ketika masyarakat merasa bahwa suara mereka tidak didengar atau bahwa keputusan dibuat untuk kepentingan segelintir elite, legitimasi institusi dapat terkikis.

b. Pentingnya Transparansi dan Komunikasi Publik

Temuan penelitian ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dan komunikasi publik yang efektif dari lembaga-lembaga negara. Banyak komentar oposisi yang muncul karena kurangnya pemahaman tentang pertimbangan hukum di balik putusan atau karena persepsi bahwa proses pengambilan keputusan tidak transparan.

Rahmanto (2022) dalam penelitiannya tentang media sosial dan persepsi publik tentang good governance menekankan bahwa komunikasi yang efektif dari pemerintah dapat mempengaruhi persepsi dan sikap masyarakat terhadap kebijakan. Dalam konteks putusan MK

ini, komunikasi publik yang lebih baik tentang ratio decidendi (pertimbangan hukum) mungkin dapat mengurangi kecurigaan dan meningkatkan penerimaan publik.

c. Media Sosial sebagai Barometer Opini Publik

Penelitian ini mendemonstrasikan bahwa media sosial dapat berfungsi sebagai barometer opini publik yang real-time. Bagi pembuat kebijakan, pemantauan dan analisis sentimen di media sosial dapat memberikan insight tentang bagaimana kebijakan diterima oleh masyarakat.

Namun, perlu dicatat bahwa opini di media sosial tidak selalu representatif dari keseluruhan populasi. Seperti yang ditunjukkan dalam penelitian ini, pengguna Instagram cenderung dari kalangan tertentu (mayoritas usia 18-34 tahun), sehingga opini yang terekam mungkin lebih mencerminkan pandangan generasi muda dan urban dibandingkan dengan populasi secara keseluruhan.

6. Relevansi dengan Teori Resepsi Stuart Hall

a. Validasi Teori dalam Konteks Digital

Penelitian ini memvalidasi relevansi Teori Resepsi Stuart Hall dalam konteks komunikasi digital. Teori yang dikembangkan Hall pada era media massa tradisional ternyata tetap applicable untuk menganalisis respons publik di media sosial.

Tiga kategori pemaknaan Hall (dominan, negosiasi, dan oposisi) terbukti mampu menangkap variasi respons publik terhadap putusan MK. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun medium komunikasi berubah, proses pemaknaan pesan oleh audiens tetap mengikuti pola-pola yang telah diidentifikasi Hall.

b. Pemaknaan Aktif Audiens

Hasil penelitian ini mengkonfirmasi konsep *active audience* dalam teori resepsi. Audiens tidak secara pasif menerima pesan media, tetapi secara aktif memaknai, menginterpretasikan, dan bahkan menolak pesan berdasarkan konteks sosial, politik, dan pengalaman personal mereka.

Variasi respons yang luas (dari dukungan penuh hingga penolakan keras) menunjukkan bahwa audiens adalah pembuat makna yang aktif. Mereka membawa perspektif, nilai, dan pengetahuan mereka sendiri dalam proses pemaknaan, menghasilkan *multiple readings* dari satu pesan yang sama.

c. Hegemoni dan Resistensi

Dominasi kategori oposisi dapat dipahami sebagai bentuk resistensi terhadap hegemoni kekuasaan. Dalam konteks teori Hall, ketika audiens melakukan oposisi reading, mereka menantang interpretasi dominan yang dikehendaki oleh penguasa atau elite.

Resistensi ini dimungkinkan oleh karakteristik media sosial yang memberikan ruang bagi *counter-discourse*. Berbeda dengan era media

massa tradisional di mana wacana cenderung dikontrol oleh pemilik media, media sosial memungkinkan munculnya wacana alternatif dan tandingan dari bottom-up.

7. Keterbatasan Penelitian dan Rekomendasi Penelitian Lanjutan

a. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui:

1) Keterbatasan Temporal

Penelitian hanya menganalisis komentar pada satu hari (16 Oktober 2023), sehingga tidak menangkap evolusi opini publik dari waktu ke waktu. Opini publik bersifat dinamis dan dapat berubah seiring dengan perkembangan informasi dan situasi politik.

2) Keterbatasan Platform

Penelitian hanya fokus pada satu platform (Instagram) dan satu akun media (@kumparancom). Respons publik di platform lain (Twitter, Facebook, TikTok) atau akun media lain mungkin berbeda.

3) Keterbatasan Demografis

Pengguna Instagram cenderung dari kalangan tertentu (mayoritas usia 18-34 tahun, urban), sehingga hasil penelitian mungkin tidak sepenuhnya representatif dari keseluruhan populasi Indonesia.

4) Keterbatasan Metodologis

Kategorisasi komentar dilakukan secara manual oleh peneliti, sehingga terdapat potensi subjektivitas dalam proses coding.

Meskipun peneliti berusaha objektif, interpretasi terhadap makna komentar dapat bervariasi.

b. Rekomendasi untuk Penelitian Lanjutan

Berdasarkan keterbatasan di atas, peneliti merekomendasikan beberapa arah untuk penelitian lanjutan:

1) Penelitian Longitudinal

Penelitian di masa depan dapat menganalisis evolusi opini publik dari waktu ke waktu, membandingkan respons pada hari pengumuman dengan respons beberapa minggu atau bulan kemudian.

2) Analisis Multi-Platform

Penelitian komparatif yang menganalisis respons publik di berbagai platform media sosial dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang opini publik.

3) Metode Mixed-Methods

Kombinasi analisis kuantitatif (seperti dalam penelitian ini) dengan metode kualitatif seperti wawancara mendalam atau focus group discussion dapat memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang reasoning di balik posisi-posisi yang diambil responden.

4) Analisis Sentimen Berbasis AI

Penggunaan teknologi Natural Language Processing (NLP) dan machine learning untuk analisis sentimen dapat meningkatkan

objektivitas dan memungkinkan analisis terhadap dataset yang lebih besar.

5) Studi tentang Echo Chamber dan Filter Bubble

Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi bagaimana algoritma media sosial mempengaruhi polarisasi opini dan pembentukan echo chamber dalam diskursus politik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap oposisi komentar unggahan Instagram @kumparancom mengenai putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia capres-cawapres, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Validasi Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa "frekuensi paling banyak pada komentar unggahan tersebut di akun @kumparancom berada pada kategori oposisi" **terbukti dan dapat diterima**. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari 232 sampel komentar yang dianalisis, kategori *Oppositional Position* mendominasi dengan persentase 45,89% (106 komentar), diikuti oleh *Negotiated Position* dengan 44,83% (104 komentar), dan *Dominant-Hegemonic Position* dengan 9,48% (22 komentar).

Meskipun hanya 1,06% atau absolutya adalah 2 komentar antara kategori oposisi dan kategori negosiasi, namun secara metodologis analisis isi kuantitatif, dominasi didasarkan pada frekuensi tertinggi dengan kata lain kategori oposisi memenuhi kriteria tersebut. Disamping itu, jika kita melihat dengan sudut pandang yang lebih luas. Gabungan kedua kategori oposisi dengan kategori negosiasi maka didapat angka 90,7% yang mana berarti

hanya kurang dari 10% publik yang benar-benar menerima keputusan tersebut tanpa adanya penolakan kritis maupun yang lebih tegas.

Dominasi kategori oposisi ini mengindikasikan bahwa mayoritas publik yang berkomentar di unggahan @kumparancom cenderung menolak atau mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan batas usia minimal capres-cawapres. Hal ini mencerminkan adanya resistensi publik yang signifikan terhadap kebijakan tersebut.

2. Karakteristik Respons Publik dalam Setiap Kategori

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi karakteristik khas dari masing-masing kategori respons publik berdasarkan Teori Resepsi Stuart Hall:

a. **Kategori *Oppositional Position* (45,89%)**

Responden dalam kategori ini menunjukkan penolakan yang tegas terhadap putusan MK dengan karakteristik:

- 1) Mencurigai adanya politisasi dan kepentingan tertentu di balik putusan
- 2) Mempertanyakan independensi dan objektivitas Mahkamah Konstitusi
- 3) Mengaitkan putusan dengan upaya pembentukan dinasti politik
- 4) Mengekspresikan kekecewaan dan kemarahan terhadap sistem politik
- 5) Menggunakan bahasa yang emosional dan tegas dalam menyampaikan kritik

- 6) Memandang timing putusan sebagai mencurigakan menjelang Pemilu 2024

b. **Kategori *Negotiated Position* (44,83%)**

Responden dalam kategori ini menunjukkan sikap kritis-konstruktif dengan karakteristik:

- 1) Menerima konsep penurunan batas usia tetapi dengan syarat tertentu
- 2) Mengajukan pertimbangan tambahan seperti standar kompetensi dan pengalaman
- 3) Melihat adanya sisi positif dan negatif dari putusan
- 4) Menggunakan bahasa yang lebih berimbang dan argumentatif
- 5) Mengkhawatirkan potensi penyalahgunaan kebijakan untuk kepentingan politik
- 6) Menuntut konsistensi dan transparansi dalam implementasi

c. **Kategori *Dominant-Hegemonic Position* (9,48%)**

Responden dalam kategori ini menunjukkan penerimaan dan dukungan penuh terhadap putusan MK dengan karakteristik:

- 1) Memandang putusan sebagai langkah progresif untuk regenerasi kepemimpinan
- 2) Menekankan pentingnya kompetensi dan kapabilitas daripada usia
- 3) Menggunakan perbandingan dengan negara-negara lain yang memiliki pemimpin muda
- 4) Mengekspresikan optimisme terhadap potensi pemimpin muda
- 5) Menggunakan bahasa yang positif dan mendukung

6) Fokus pada aspek peluang dan kesempatan bagi generasi muda

3. Tema-tema Dominan dalam Diskursus Publik

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa tema dominan yang muncul dalam diskursus publik terkait putusan MK :

a. **Politisasi Putusan dan Independensi MK**

Tema paling dominan dalam kategori oposisi adalah tuduhan politisasi putusan MK. Banyak responden mencurigai bahwa putusan dibuat untuk mengakomodasi kepentingan politik tertentu, khususnya terkait dengan calon-calon yang sebelumnya tidak memenuhi syarat usia. Hal ini mencerminkan erosi kepercayaan publik terhadap independensi lembaga peradilan konstitusi.

b. **Isu Dinasti Politik**

Isu dinasti politik menjadi concern utama yang berulang kali muncul dalam komentar. Responden mengkhawatirkan bahwa putusan ini akan mempermudah pembentukan dinasti politik di Indonesia, di mana anggota keluarga petahana dapat lebih mudah mencalonkan diri untuk posisi-posisi strategis.

c. **Timing yang Mencurigakan**

Waktu keluarnya putusan yang berdekatan dengan Pemilu 2024 menjadi sorotan publik. Banyak responden yang mempertanyakan timing ini dan menganggapnya sebagai indikasi bahwa putusan dipengaruhi oleh agenda politik jangka pendek.

d. **Regenerasi vs Pengalaman**

Terdapat perdebatan antara pentingnya regenerasi kepemimpinan dengan kebutuhan akan pengalaman dan kematangan. Responden yang mendukung menekankan pentingnya memberi kesempatan kepada generasi muda, sementara yang menolak atau negotiated menekankan pentingnya pengalaman dan track record.

e. **Kompetensi dan Standar Kepemimpinan**

Baik responden yang mendukung maupun yang kritis sepakat tentang pentingnya kompetensi. Namun, mereka berbeda dalam cara pandang: pendukung yakin bahwa kompetensi tidak terkait usia, sementara yang kritis menuntut adanya standar kompetensi yang jelas untuk memastikan bahwa calon yang muda benar-benar qualified.

4. **Fungsi Instagram sebagai Ruang Publik Digital**

Penelitian ini mengkonfirmasi fungsi Instagram sebagai ruang publik digital (*digital public sphere*) dalam konteks komunikasi politik di Indonesia :

a. **Demokratisasi Suara dan Partisipasi Masif**

Instagram terbukti berfungsi sebagai platform yang demokratis di mana berbagai suara dari berbagai latar belakang dapat terdengar. Jumlah komentar yang mencapai 2.188 pada satu unggahan menunjukkan tingkat partisipasi publik yang sangat tinggi terhadap isu politik strategis.

b. **Kebebasan Berekspresi**

Platform media sosial memberikan ruang bagi kebebasan berekspresi yang lebih luas dibandingkan dengan ruang publik konvensional. Responden merasa lebih bebas untuk mengkritik kebijakan pemerintah dan mengekspresikan ketidaksetujuan mereka secara terbuka.

c. Spontanitas dan Reaktivitas

Komunikasi politik di Instagram bersifat spontan dan reaktif. Komentar-komentar yang muncul pada hari pengumuman putusan mencerminkan respons emosional yang immediate, berbeda dengan komunikasi politik formal yang cenderung lebih terstruktur dan tertunda.

d. Polarisasi Opini

Instagram juga menunjukkan karakteristik polarisasi opini yang cukup jelas. Terdapat pemisahan yang tajam antara kelompok yang mendukung (9,48%) dan yang menolak (45,89%), dengan kelompok tengah (44,83%).

e. Medium untuk Counter-Discourse

Media sosial memungkinkan munculnya wacana tandingan (*counter-discourse*) dari bottom-up. Dominasi kategori oposisi menunjukkan bahwa platform ini memberikan ruang bagi resistensi terhadap narasi atau kebijakan dominan.

5. Relevansi Teori Resepsi Stuart Hall dalam Konteks Digital

Penelitian ini memvalidasi relevansi dan aplikabilitas Teori Resepsi Stuart Hall dalam menganalisis respons publik di media sosial :

a. **Kerangka Kategorisasi yang Efektif**

Tiga kategori pemaknaan Hall (*dominant, negotiated, dan oppositional*) terbukti efektif dalam menangkap variasi respons publik terhadap putusan MK. Kategorisasi ini mampu membedakan nuansa dalam cara publik memaknai dan merespons kebijakan politik.

b. **Konsep Active Audience**

Hasil penelitian mengkonfirmasi konsep *active audience* dalam teori resepsi. Publik tidak secara pasif menerima pesan media, tetapi secara aktif memaknai, menginterpretasikan, dan bahkan menolak pesan berdasarkan konteks sosial, politik, dan pengalaman personal mereka.

c. **Multiple Readings**

Variasi respons yang luas dari satu pesan yang sama menunjukkan adanya *multiple readings*. Audiens membawa perspektif, nilai, dan pengetahuan mereka sendiri dalam proses pemaknaan, menghasilkan interpretasi yang beragam.

d. **Resistensi terhadap Hegemoni**

Dominasi kategori *oppositional* dapat dipahami sebagai bentuk resistensi terhadap hegemoni kekuasaan. Ketika audiens melakukan *oppositional reading*, mereka menantang interpretasi dominan yang dikehendaki oleh penguasa atau elite.

6. Implikasi terhadap Kepercayaan Publik dan Legitimasi Institusi

Hasil penelitian mengungkapkan implikasi serius terhadap kepercayaan publik dan legitimasi institusi demokratis :

a. **Erosi Kepercayaan terhadap MK**

Dominasi kategori oposisi dan banyaknya komentar yang mempertanyakan independensi MK menunjukkan adanya erosi kepercayaan publik terhadap lembaga ini. Ketika publik mempersepsikan bahwa lembaga yang seharusnya independen terpengaruh oleh kepentingan politik, legitimasi institusi dapat terkikis.

b. **Tantangan terhadap Sistem Demokrasi**

Ketidakpercayaan terhadap institusi merupakan tantangan serius bagi sistem demokrasi. Demokrasi memerlukan kepercayaan publik terhadap institusi-institusi penyelenggara negara. Ketika kepercayaan ini menurun, efektivitas sistem demokrasi dapat terpengaruh.

c. **Kebutuhan akan Transparansi**

Temuan penelitian menggarisbawahi pentingnya transparansi dan komunikasi publik yang efektif dari lembaga-lembaga negara. Banyak komentar oposisi yang muncul karena kurangnya pemahaman tentang pertimbangan hukum di balik putusan atau karena persepsi bahwa proses pengambilan keputusan tidak transparan.

7. Kontribusi Penelitian terhadap Ilmu Komunikasi

Penelitian ini memberikan beberapa kontribusi penting bagi pengembangan ilmu komunikasi, khususnya dalam kajian komunikasi politik di era digital:

a. **Validasi Teori Klasik dalam Konteks Baru**

Penelitian ini menunjukkan bahwa teori-teori komunikasi klasik seperti Teori Resepsi Stuart Hall dan Teori Ruang Publik Habermas tetap relevan dalam konteks komunikasi digital, meskipun medium dan karakteristik komunikasi telah berubah.

b. **Pemahaman tentang Komunikasi Politik Digital**

Penelitian ini memberikan wawasan empiris tentang karakteristik komunikasi politik di media sosial Indonesia, termasuk aspek polarisasi, emosionalitas, dan partisipasi masif.

c. **Metodologi Analisis Isi dalam Media Sosial**

Penelitian ini mengembangkan dan mendemonstrasikan metodologi analisis isi yang dapat diaplikasikan untuk mengkaji respons publik di media sosial, memberikan referensi metodologis bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

d. **Data Empiris tentang Opini Publik**

Penelitian ini menyediakan data empiris tentang opini publik Indonesia terhadap isu politik strategis, yang dapat menjadi referensi bagi peneliti, pembuat kebijakan, dan praktisi komunikasi.

8. Refleksi tentang Demokrasi Digital di Indonesia

Secara keseluruhan, penelitian ini mengundang refleksi yang lebih luas tentang kondisi demokrasi digital di Indonesia :

a. **Potensi dan Tantangan**

Media sosial memiliki potensi besar untuk memperdalam demokrasi melalui peningkatan partisipasi publik dan kebebasan berekspresi. Namun, media sosial juga menghadirkan tantangan berupa polarisasi, emosionalitas berlebihan, dan potensi penyebaran misinformasi.

b. **Pentingnya Literasi Digital dan Critical Thinking**

Hasil penelitian menunjukkan perlunya peningkatan literasi digital dan kemampuan berpikir kritis masyarakat agar dapat mengonsumsi informasi dan berpartisipasi dalam diskursus publik secara lebih produktif dan konstruktif.

c. **Keseimbangan antara Kebebasan dan Kualitas Diskursus**

Tantangan ke depan adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi di media sosial dengan kualitas diskursus publik yang rasional dan konstruktif.

d. **Peran Berbagai Stakeholder**

Membangun demokrasi digital yang sehat memerlukan peran aktif dari berbagai pihak: pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan komunikasi publik, media perlu menjaga standar jurnalisme yang berkualitas, platform media sosial perlu mengembangkan mekanisme untuk memitigasi polarisasi dan misinformasi, dan masyarakat perlu mengembangkan kemampuan untuk berpartisipasi secara konstruktif.

Kesimpulan Akhir

Penelitian ini berhasil menjawab rumusan masalah tentang bagaimana oposisi netizen dalam komentar unggahan putusan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan batas usia minimal capres-cawapres di Instagram @kumparancom. Hasil penelitian menunjukkan bahwa oposisi netizen mendominasi respons publik (52,59%), mencerminkan ketidakpuasan dan kritik yang signifikan terhadap putusan MK.

Oposisi ini tidak muncul dalam ruang hampa, tetapi dalam konteks politik Indonesia yang kompleks menjelang Pemilu 2024, di mana isu-isu seperti dinasti politik, independensi institusi, dan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi menjadi sangat relevan. Instagram sebagai ruang publik digital telah memfasilitasi ekspresi oposisi ini, memberikan platform bagi berbagai suara untuk didengar dan menciptakan diskursus publik yang intens tentang isu politik strategis.

Meskipun oposisi mendominasi, keberadaan kategori negotiated dan dominant menunjukkan bahwa opini publik tidak monolitik. Terdapat spektrum respons yang mencerminkan keragaman perspektif dalam masyarakat Indonesia. Ini adalah indikasi positif dari pluralisme dalam ruang publik digital Indonesia.

Akhirnya, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya memahami respons publik dalam konteks komunikasi politik digital. Di era di mana media sosial menjadi arena penting untuk diskursus politik, pemahaman tentang

bagaimana publik memaknai dan merespons kebijakan menjadi crucial bagi pembuat kebijakan, media, dan semua pihak yang berkepentingan dengan kualitas demokrasi Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti mengajukan beberapa saran yang ditujukan kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan komunikasi politik, demokrasi digital, dan pengelolaan opini publik di Indonesia. Saran-saran ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi peningkatan kualitas diskursus publik dan penguatan demokrasi di Indonesia.

1. Saran untuk Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Peradilan

a. Peningkatan Transparansi dan Komunikasi Publik

Mahkamah Konstitusi perlu meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan memperkuat komunikasi publik tentang pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) di balik setiap putusannya. Hal ini penting untuk :

- 1) Mengurangi kecurigaan publik tentang politisasi putusan
- 2) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dasar hukum keputusan
- 3) Memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap MK
- 4) Mencegah interpretasi yang keliru atau tendensius terhadap putusan

Langkah konkret yang dapat dilakukan :

- 1) Mempublikasikan ringkasan putusan dalam bahasa yang mudah dipahami publik awam
- 2) Mengadakan konferensi pers yang lebih komprehensif setelah pembacaan putusan penting
- 3) Memanfaatkan media sosial resmi MK untuk menjelaskan pertimbangan hukum secara lebih accessible
- 4) Menyediakan infografis atau video explainer tentang putusan-putusan strategis

b. **Konsistensi dan Prediktabilitas Putusan**

MK perlu menjaga konsistensi dalam putusannya untuk membangun prediktabilitas dan kepercayaan publik. Jika terdapat perubahan dari putusan sebelumnya, pertimbangan yuridis untuk perubahan tersebut perlu dijelaskan secara komprehensif kepada publik.

c. **Engagement dengan Publik**

MK dapat mempertimbangkan untuk melakukan *public hearing* atau *town hall meeting* untuk isu-isu strategis yang berpotensi kontroversial. Ini memberikan kesempatan bagi publik untuk menyampaikan pandangan mereka dan menciptakan rasa ownership terhadap proses demokrasi.

2. Saran untuk Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

a. Mempertimbangkan Respons Publik dalam Proses Kebijakan

Pemerintah perlu menjadikan pemantauan dan analisis opini publik di media sosial sebagai bagian integral dari proses pengambilan kebijakan.

Respons publik dapat memberikan **early warning** tentang potensi resistensi terhadap suatu kebijakan dan membantu dalam penyesuaian strategi komunikasi.

Langkah konkret yang dapat dilakukan:

- Membentuk tim khusus untuk memantau dan menganalisis sentimen publik di media sosial
- Menggunakan tools analitik dan AI untuk analisis sentimen secara real-time
- Melakukan konsultasi publik yang lebih luas sebelum mengimplementasikan kebijakan strategis
- Mengembangkan mekanisme feedback yang efektif dari publik

b. Memperkuat Komunikasi dan Edukasi Publik

Pemerintah perlu mengembangkan strategi komunikasi publik yang lebih efektif, khususnya untuk isu-isu yang sensitif atau kontroversial.

Komunikasi harus dilakukan secara proaktif, bukan reaktif, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami serta channel yang tepat untuk menjangkau berbagai segmen masyarakat.

c. Membangun Kepercayaan Melalui Transparansi

Transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan akuntabilitas terhadap publik adalah kunci untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan publik. Pemerintah perlu membuka akses informasi yang lebih luas dan memberikan penjelasan yang komprehensif tentang dasar pertimbangan kebijakan.

d. **Mengembangkan Kebijakan untuk Demokrasi Digital yang Sehat**

Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung demokrasi digital yang sehat, termasuk:

- Regulasi yang melindungi kebebasan berekspresi sambil memitigasi misinformasi dan *hate speech*
- Program literasi digital untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengonsumsi dan memproduksi informasi
- Insentif bagi platform media sosial untuk mengembangkan fitur yang mendorong diskursus yang konstruktif

3. Saran untuk Media Massa dan Jurnalis

a. **Menjaga Standar Jurnalisme yang Berkualitas**

Media massa, termasuk media digital seperti @kumparancom, perlu terus menjaga standar jurnalisme yang tinggi dalam memberitakan isu-isu politik. Hal ini meliputi:

- 1) Memberikan konteks yang komprehensif dalam setiap pemberitaan
- 2) Menyajikan berbagai perspektif secara berimbang
- 3) Melakukan verifikasi fakta secara ketat sebelum publikasi

- 4) Menghindari clickbait atau framing yang sensasional yang dapat memicu polarisasi

b. Mendorong Diskursus yang Konstruktif

Media perlu berperan aktif dalam mendorong diskursus publik yang konstruktif, bukan hanya menjadi platform untuk polarisasi. Ini dapat dilakukan dengan:

- 1) Memoderasi kolom komentar untuk mencegah hate speech dan disinformasi
 - Menyediakan ruang untuk dialog dan debat yang berkualitas
 - Menghadirkan analisis mendalam dari berbagai perspektif
 - Mengedukasi audience tentang pentingnya critical thinking dan fact-checking

c. Literasi Media untuk Publik

Media dapat berperan dalam meningkatkan literasi media publik melalui:

- 1) Konten edukasi tentang cara membaca berita secara kritis
- 2) Transparansi tentang proses jurnalistik dan sumber informasi
- 3) Program kolaborasi dengan institusi pendidikan untuk literasi media

d. Memanfaatkan Data Analytics untuk Memahami Audience

Media perlu memanfaatkan analisis data untuk lebih memahami bagaimana audience merespons konten mereka dan menggunakan insight ini untuk meningkatkan kualitas konten dan strategi engagement.

4. Saran untuk Platform Media Sosial

a. **Mengembangkan Fitur untuk Mengurangi Polarisasi**

Platform media sosial seperti Instagram perlu mengembangkan fitur-fitur yang dapat mengurangi polarisasi dan echo chamber, seperti:

- 1) Algoritma yang lebih beragam yang tidak hanya menampilkan konten yang sejalan dengan preferensi pengguna
- 2) Fitur yang mendorong exposure terhadap perspektif yang berbeda
- 3) Label atau warning untuk konten yang berpotensi menyesatkan
- 4) Tools untuk fact-checking yang terintegrasi

b. **Moderasi Konten yang Lebih Efektif**

Platform perlu meningkatkan moderasi konten untuk mencegah penyebaran hate speech, misinformasi, dan konten yang dapat memicu kekerasan, sambil tetap menghormati kebebasan berekspresi.

c. **Transparansi Algoritma**

Platform perlu lebih transparan tentang bagaimana algoritma mereka bekerja dan bagaimana konten diprioritaskan, sehingga pengguna dapat membuat keputusan yang lebih informed tentang konsumsi informasi mereka.

d. **Kolaborasi dengan Fact-Checkers**

Platform dapat berkolaborasi dengan organisasi fact-checking independen untuk memverifikasi informasi yang beredar dan memberikan konteks yang akurat kepada pengguna.

5. Saran untuk Masyarakat dan Pengguna Media Sosial

a. **Meningkatkan Literasi Digital dan Critical Thinking**

Masyarakat perlu terus meningkatkan literasi digital dan kemampuan berpikir kritis dalam mengonsumsi informasi di media sosial:

- 1) Memverifikasi informasi dari berbagai sumber sebelum mempercayainya
- 2) Mengenali bias dalam pemberitaan dan opini
- 3) Memahami bagaimana algoritma media sosial bekerja
- 4) Tidak mudah terprovokasi oleh konten yang sensasional atau emosional

b. **Berpartisipasi Secara Konstruktif**

Dalam berpartisipasi di diskursus publik di media sosial, masyarakat didorong untuk:

- 1) Menyampaikan pendapat dengan argumentasi yang rasional, bukan hanya emosi
- 2) Menghormati perbedaan pendapat dan menghindari personal attack
- 3) Fokus pada substansi isu, bukan pada menyerang individu atau kelompok
- 4) Menggunakan bahasa yang sopan dan tidak mengandung hate speech

c. **Diversifikasi Sumber Informasi**

Masyarakat perlu aktif mencari informasi dari berbagai sumber yang berbeda untuk mendapatkan perspektif yang lebih lengkap dan menghindari echo chamber. Jangan hanya mengandalkan satu platform atau satu media saja.

d. Menjadi Warga Digital yang Bertanggung Jawab

Setiap pengguna media sosial perlu menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab dalam membentuk ruang publik digital yang sehat:

- 1) Tidak menyebarkan informasi yang belum diverifikasi
- 2) Melaporkan konten yang melanggar atau menyesatkan
- 3) Mendukung konten yang berkualitas dan konstruktif
- 4) Menjadi role model dalam berkomunikasi secara baik di media sosial

6. Saran untuk Institusi Pendidikan

a. Integrasi Literasi Digital dalam Kurikulum

Institusi pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi perlu mengintegrasikan literasi digital dan media literacy dalam kurikulum:

- 1) Mengajarkan cara mengevaluasi sumber informasi
- 2) Melatih kemampuan berpikir kritis terhadap informasi online
- 3) Mengedukasi tentang etika komunikasi digital
- 4) Mengembangkan pemahaman tentang civic engagement di era digital

b. Penelitian dan Pengembangan

Perguruan tinggi perlu terus melakukan penelitian tentang komunikasi politik digital, demokrasi digital, dan fenomena media sosial untuk memberikan evidence-based recommendations bagi berbagai stakeholder.

c. **Progrm Pelatihan untuk Masyarakat**

Institusi pendidikan dapat menyelenggarakan program pelatihan atau workshop untuk masyarakat umum tentang literasi digital, critical thinking, dan partisipasi politik yang konstruktif.

7. **Saran untuk Partai Politik dan Politisi**

a. **Komunikasi Politik yang Etis**

Partai politik dan politisi perlu berkomitmen untuk melakukan komunikasi politik yang etis di media sosial:

- 1) Tidak menyebarkan hoax atau disinformasi
- 2) Tidak melakukan black campaign atau menyerang pribadi lawan politik
- 3) Fokus pada program dan visi, bukan pada isu-isu yang memecah belah
- 4) Menghormati proses demokrasi dan institusi negara

b. **Engagement yang Autentik dengan Konstituen**

Politisi perlu menggunakan media sosial bukan hanya sebagai alat propaganda, tetapi sebagai medium untuk dialog dua arah yang autentik

dengan konstituen mereka. Mendengarkan aspirasi dan concern publik di media sosial dan meresponsnya secara substantif.

c. **Edukasi Politik untuk Masyarakat**

Partai politik dapat berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang sistem politik, proses demokrasi, dan hak-hak politik mereka, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara lebih informed.

8. **Saran untuk Penelitian Lanjutan**

Berdasarkan keterbatasan penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa saran untuk penelitian lanjutan:

a. **Penelitian Longitudinal**

Penelitian di masa depan dapat menganalisis evolusi opini publik dari waktu ke waktu. Bagaimana respons publik berubah dari hari pengumuman hingga beberapa minggu atau bulan kemudian? Apakah terjadi pergeseran dari oposisi ke penerimaan atau sebaliknya?

b. **Analisis Komparatif Multi-Platform**

Penelitian komparatif yang menganalisis respons publik di berbagai platform media sosial (Instagram, Twitter/X, Facebook, TikTok) dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang karakteristik diskursus politik di masing-masing platform.

c. **Studi Kualitatif Mendalam**

Penelitian kualitatif dengan metode wawancara mendalam atau focus group discussion dapat memberikan pemahaman yang lebih kaya

tentang reasoning dan motivasi di balik posisi-posisi yang diambil responden.

d. **Analisis dengan Teknologi AI**

Penggunaan teknologi Natural Language Processing (NLP) dan machine learning untuk analisis sentimen dapat meningkatkan objektivitas dan memungkinkan analisis terhadap dataset yang jauh lebih besar.

e. **Penelitian tentang Echo Chamber dan Filter Bubble**

Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi bagaimana algoritma media sosial mempengaruhi polarisasi opini dan pembentukan echo chamber dalam diskursus politik Indonesia.

f. **Studi tentang Efektivitas Intervensi**

Penelitian dapat dilakukan untuk menguji efektivitas berbagai intervensi dalam meningkatkan kualitas diskursus publik di media sosial, seperti fact-checking labels, exposure to diverse perspectives, atau digital literacy programs.

g. **Analisis Demografis yang Lebih Detail**

Penelitian lanjutan dapat menganalisis bagaimana faktor demografis (usia, gender, pendidikan, lokasi geografis, afiliasi politik) mempengaruhi cara individu merespons isu-isu politik di media sosial.

h. **Studi tentang Pengaruh Influencer dan Opinion Leaders**

Penelitian dapat mengeksplorasi peran influencer dan opinion leaders dalam membentuk opini publik di media sosial dan bagaimana pengaruh mereka bervariasi di berbagai segmen masyarakat.

9. Penutup

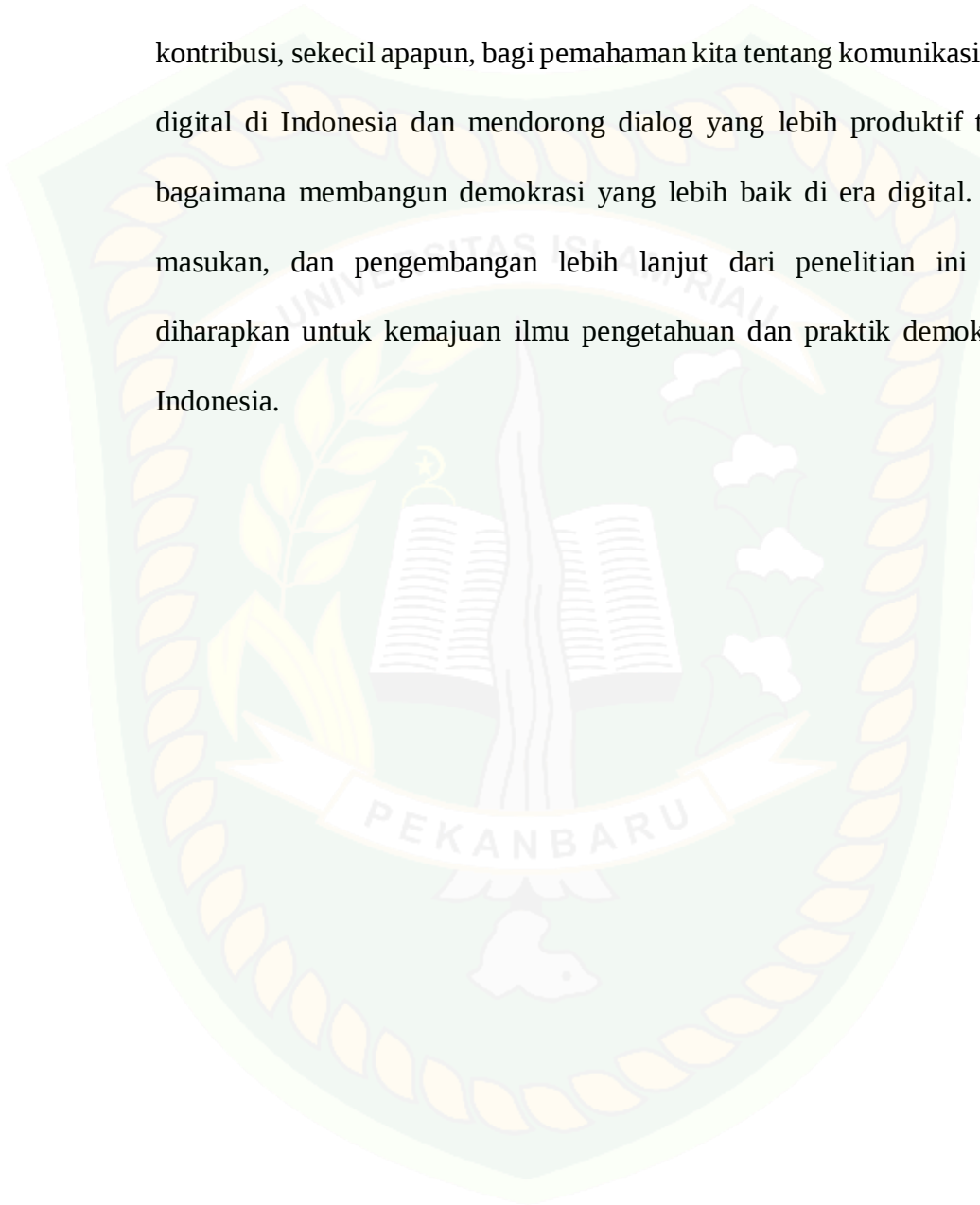
Penelitian tentang oposisi komentar unggahan Instagram @kumparancom terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia capres-cawapres ini memberikan snapshot penting tentang dinamika opini publik dan komunikasi politik di era digital. Temuan bahwa oposisi mendominasi respons publik (52,59%) bukan hanya angka statistik, tetapi refleksi dari tantangan yang dihadapi demokrasi Indonesia dalam membangun kepercayaan antara masyarakat dan institusi negara.

Saran-saran yang diajukan dalam penelitian ini bukanlah solusi instan, tetapi langkah-langkah yang perlu dilakukan secara konsisten dan kolaboratif oleh semua stakeholder. Membangun demokrasi digital yang sehat memerlukan komitmen jangka panjang dari pemerintah, institusi negara, media, platform teknologi, dan masyarakat itu sendiri.

Media sosial adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari dalam politik kontemporer. Alih-alih memandangnya sebagai ancaman, kita perlu melihatnya sebagai peluang untuk memperdalam demokrasi melalui peningkatan partisipasi publik dan kebebasan berekspresi. Namun, potensi ini hanya dapat terwujud jika semua pihak bekerja sama untuk menciptakan

ruang publik digital yang kondusif untuk diskursus yang rasional, konstruktif, dan beradab.

Akhirnya, peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi, sekecil apapun, bagi pemahaman kita tentang komunikasi politik digital di Indonesia dan mendorong dialog yang lebih produktif tentang bagaimana membangun demokrasi yang lebih baik di era digital. Kritik, masukan, dan pengembangan lebih lanjut dari penelitian ini sangat diharapkan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan praktik demokrasi di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, B. (2021). Media Sosial sebagai Saluran Aspirasi Kewargaan : Studi Pembahasan RUU Cipta Kerja. *Jurnal PIKMA: Publikasi Media Dan Cinema*, 3(2), 107–127.
- Baser, G., & Setiawan, H. (2021). Oposisi Komentar Unggahan Instagram @Kumparancom(Studi Pada Informasi Larangan Penggunaan Masker Scuba). *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, XII(2), 147–156.
- Caliandro, A., & Graham, J. (2020). Studying Instagram Beyond Selfies. *Social Media and Society*, 6(2): 1-7.
- Carr, C. T., & Hayes, R. A. (2015). Social Media: Defining, Developing, and Divining. *Jurnal Akademik. Atlantic Journal of Communication*.
- Daşli, Y. 2019. Use of Social Media as a Tool for Political Communication in the Field of Politics. *Ordu University Journal of Social Science Research*, Vol. 9, No. 1, March 2019, pp.243-251.
- Ernayani, R., GS, A. D., P.Tarigan, N., Lestari, W., & Timotius, E. (2021). Kajian fenomenologi pemasaran digital agen properti melalui medium instagram. *Jurnal Komunikasi Profesional*, 5(3), 260–269.
- Gurevitch, M., Coleman, S., & Blumler, J. G. 2009. Political Communication—Old and New Media Relationships. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 625, The End of Television? Its Impact on the World (So Far) (Sep., 2009), pp.164-181.
- Herlinawati, N. Et Al., 2020. Analisis Sentimen Zoom Cloud Meetings Di Play Store Menggunakan Naïve Bayes. *Malcom: Indonesian Journal Of Machine Learning And Computer Science*, 2(1), 47-54.
- Haromain, M. S. (2023). Peran Humas dan Manajemen Opini Publik di SMP-SMA Al Binaa Islamic Boarding School. *Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)*, 3(3), 545–552.
- Khairunisa, Dewi, S. K., Rahmawati, D. D., & Sari, A. (2024). Analisis Sentimen Komentar pada Postingan Instagram " StandWithUs " Menggunakan Klasifikasi Naive Baye. *Jurnal Ilmiah Informatika*, 2(12), 1–15.
- Kriyantono, Rachmat. 2020. Edisi Kedua. Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif dan Kualitatif. *Prenadamedia Group: Jakarta*
- Liu, Y., & Liu, H. 2022. The Impact of Employee Performance on Public Service Quality. *International Journal of Public Administration*, 1-15. DOI: 10.1080/01900692.2022.1234567

- Nasrullah, Rulli M. 2019. *Teori dan Riset Media Siber (cybermedia)*. Kencana (Prenada Media Grub): Jakarta
- Nasrullah, Rulli. (2019), Internet dan Ruang Publik Virtual, Sebuah Refleksi atas Teori Ruang Publik Habermas. *Jurnal Komunikator*, 4, 27-35
- Pangidoan, J. R., Windrati, N. K., & Windyaningrum, R. (2024). Analisis Framing Pemberitaan Media Daring tentang Citra Mahkamah Konstitusi dalam Hasil Gugatan Batasan Usia Capres-Cawapres (Detik.com dan Kompas.com). *ArtComm : Jurnal Komunikasi Dan Desain*, 7(1), 23–36.
- Paradita, S. A., & Triadi, I. (2024). Analisis Perubahan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Pemilu 2024 Melalui Tinjauan Hukum Tata Negara. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 1–13.
- Poulakidakos, S., & Veneti, A. (2018). Political Communication and Twitter in Greece: Jumps on the Bandwagon or an Enhancement of the Political Dialogue? (pp. 119–146). <https://doi.org/10.4018/978-1-4666-9879-6.ch007>
- Pratama, F. R., & Rivan, E. (2024). Analisis Sentimen Pada Komentar Instagram Menggunakan Gaussian Naïve Bayes. *Scientia*, 3(2), 587–596.
- Prihanum, A., & Fadillah, D. (2024). Analisis Sentimen Tanggapan Publik di Media Sosial Instagram Terhadap Program CSR “ Esg Existance (EXIST)” PT Telkom. *JURNAL AUDIENS*, 5(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jas.v5i4.469>
- Rahmanto, A. N. (2022). Media Sosial dan Persepsi Publik tentang Good Governance pada Pemerintah Daerah di Solo Raya. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 20(1), 88–100.
- Rahmayanti, A. F., & Ediati, A. (2022). Pertemanan Online Dan Pengungkapan Diri Pada Dewasa Awal Pengguna Instagram. *Jurnal Empati*, 11, 325–331.
- Rahmat, A. F., & Purnomo, E. P. 2020. Twitter Media Platform to Set-Up Political Branding: Analyzing @Kiyai_Marufamin in 2019 Presidential Election Campaign. Nyimak: *Journal of Communication*, Vol. 4, No. 1, Maret 2020, pp. 73–87.
- Samsir, Ambiyar, Verawardina, U., & Edi, F. (2021). Analisis Sentimen Pembelajaran Daring Pada Twitter di Masa Pandemi COVID-19 Menggunakan Metode Naïve Bayes. *Jurnal Media Informatika Budidarma*, 5(1), 149. <https://doi.org/10.30865/mib.v5i1.2604>
- Sari, D. N., & Basit, A. (2020). Media Sosial Instagram Sebagai Media Informasi Edukasi Parenting. *PERSEPSI: Communication Journal*, 3, 23–36. <https://doi.org/10.30596/persepsi.v>
- Siregar, J. P. (2021). Korelasi Antara Konfigurasi Ruang Publik Dengan Interaksi Sosial: Pendekatan Space Syntax Dengan Studi Kasus Pada Kawasan Perumahan Di Kota Malang. *Jurnal Tata KOta Dan Daerah*, 13, 15–22.

- Sitorusa, H. J., Tanoyob, M., & Irwansyahc. (2024). Polarisasi Politik Melalui Interaksi Sosial Di Instagram : Studi Kasus Pemilu 2024 Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial (JKOMDIS)*, 4(2), 383–394.
- Stieglitz, S., Brockmann, T., & Xuan, L. D. 2021. Usage of Social Media for Political Communication. Conference: 16th Pacific Asia Conference on Information Systems (PACIS) Proceedings. Paper 22.
- Sugitanata, A. (2023). Dinamika Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dynamics Of Constitutional Court Decisions Regarding The Age Limits Of Presidential And Vice Presidential Candidates. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(4), 127–146.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. Alfabeta.
- Sukarno, M., Wirnasih, A. S., Wijaya, H. H., & Cahyani, P. S. (2021). Analisis Pelayanan Publik Berbasis Media Sosial (Studi Kasus Provinsi Jawa Tengah). *Journal of Social Politics and Governance*, 3(1).
- Sutrisno, A. P., & Mayangsari, I. D. (2021). Pengaruh Penggunaan Media Sosial Instagram @ Humasbdg Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Followers. *Jurnal Common*, 5(X).
- Velasquez, A., & Rojas, H. 2017. Political Expression on Social Media: The Role of Communication Competence and Expected Outcomes. *Journals Social Media + Society*, January-March 2017, pp.1–13
- https://www.instagram.com/p/Cyc_sdmxzOz/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng==
- <https://www.garuda.website/blog/data-pengguna-instagram-2024-indonesia/#:~:text=Menurut%20data%20yang%20dikumpulkan%20pada%20Agustus%202024%2C%20jumlah,setara%20dengan%2031%2C6%25%20dari%20total%20populasi%20negara%20ini>
- <https://napoleoncat.com/stats/social-media-users-in-indonesia/2024/#section-instagram>
- https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_3646_1941_Ikhtisar_90_2023.pdf



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 309/FIKOM/KPTS/2025
TENTANG**

PENETAPAN SPONSOR PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEKAN FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu Mahasiswa dalam penulisan Skripsi perlu ditetapkan Sponsor yang akan memberi bimbingan sepenuhnya terhadap Mahasiswa;
- b. bahwa penetapan Dosen sebagai Sponsor perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan;
- c. bahwa mahasiswa yang nama tertera dalam SK ini telah mendapatkan proses bimbingan sejak Usulan Judul Penelitian disahkan oleh pihak Prodi;
- d. bahwa mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini telah menjalankan proses bimbingan dan melaksanakan Seminar Usulan Penelitian pada 05 November 2025;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Surat Keputusan Depdiknas No. 1078/D/T/2009 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Komunikasi di UIR;
4. Peraturan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Riau Nomor 01/PER/YLPI-I/2024 tentang Statuta Universitas Islam Riau;
5. Surat Keputusan Rektor UIR Nomor : 282/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Program Studi di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor 0905/UIR/KPTS/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan dan Direktur Program Pascasarjana di Lingkungan Universitas Islam Riau.
7. Peraturan UIR No. 1 Tahun 2018 tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau;
8. Peraturan Rektor UIR Nomor: 9 Tahun 2022 Tentang Etika Pembimbing Skripsi;
9. Surat Penunjukan Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI TENTANG PENETAPAN SPONSOR PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

1. Menunjuk dosen yang namanya tertera berikut ini:

Nama : **Assoc. Prof. Dr. Yudi Daherman, M.I.Kom**
NIDN/NPK : 160702620
Pangkat/Jabatan : Lektor Kepala/ III/d

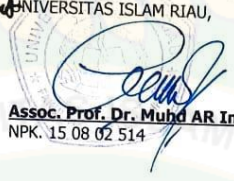
Sebagai **Sponsor** atas penulisan Skripsi Mahasiswa:

Nama * : **Cahyono Putra**
NPM : 199110184
Prodi : Ilmu Komunikasi
Judul : **Oposisi Komentar Unggahan Instagram @kumparancom (Studi Pada Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Batas Usia Capres Cawapres)**

2. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya di perhatikan usul dan saran dari tim Seminar Proposal.
3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan yang berlaku dalam lingkungan Universitas Islam Riau.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 01 Juli 2025 M
5 Muharam 1447 H

DEKAN FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU,


Assoc. Prof. Dr. Mund AR Imam Riau, M.I.Kom
NPK. 15 08 02 514



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

الجامعة الإسلامية الرياوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fikom@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 0361/A-UIR/5-FIKOM/2026

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : CAHYONO PUTRA
Npm : 199110184
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : Oposisi Komentar Unggahan Instagram @kumparancom (Studi pada Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Batas Usia Capres-Cawapres)
Persentasi Plagiasi : 21%
Status : Lulus

Skripsi yang bersangkutan dinyatakan telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan program Aplikasi Turnitin.

Demikian Surat Keterangan dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 06 Maret 2026
Hormat Kami,
Wakil Dekan Bidang Akademik
Riset dan Inovasi



Dr. Al Sukri, S.Sos, M.I.Kom
NPK : 16 07 02 591

BIODATA PENULIS**A. Identitas Diri**

Nama : Cahyono Putra
Tempat, Tanggal Lahir : Pangkalan Nyirih, 17 Juli 2000
Agama : Islam
Alamat : Jl. Karya 1
Email : chynptr17@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 05 Pangkalan Nyirih Rupert
SMP : SMP Negeri 02 Pangkalan Nyirih Rupert
SMA : SMA Swasta Al-Amin Bengkalis
Strata Satu (S1) : Universitas Islam Riau